

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Departemen Luar Negeri

3.1.1 Sejarah Instansi

Departemen Luar Negeri yang berkantor pusat di Jalan Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat merupakan salah satu departemen yang berdiri setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk menjalankan tugas kenegaraan maka dibentuklah 13 kementerian, termasuk Departemen Luar Negeri. Dasar spesifik Departemen Luar Negeri adalah didasari kebutuhan diplomasi pasca kemerdekaan khususnya status Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Penegasan itu mencerminkan kebutuhan pengembangan wawasan ke-Indonesiaan, baik dalam konteks kewilayahan maupun kebangsaan. Pada tingkat pelaksanaan, efektifitas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan sinergi dan keterlibatan di antara seluruh *stake holders* yang berwujud pada diplomasi total.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang pertama adalah Ahmad Subardjo, dan dibantu oleh tiga orang sukarelawan yang belum pernah mempelajari apalagi berpengalaman dalam bidang diplomasi. Dalam lima tahun pertama, Departemen Luar Negeri tidak memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas. Pada masa ini Departemen Luar Negeri hanya memiliki sub-sub bagian yang sangat sederhana, yaitu

- a. Sekretariat
- b. Seksi Hubungan Masyarakat
- c. Seksi Politik
- d. Seksi Penerjemah
- e. Seksi Tata Usaha
- f. Seksi Penghubung

Namun pada perkembangannya seksi-seksi yang ada di Departemen Luar Negeri berkembang menjadi semakin terarah. Dalam pernyataannya Menteri Luar Negeri, Ahmad Subardjo menegaskan bahwa pada fase awal kemerdekaan, Departemen Luar Negeri menitikberatkan perjuangannya dalam perjuangan diplomatik dalam kaitannya pada perjuangan pengakuan yuridis bangsa Indonesia kepada dunia internasional. Sehingga wajar jika Departemen Luar Negeri disebut komponen utama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam bidang diplomasi.

3.1.2 Visi dan Misi Departemen Luar Negeri

Visi Departemen Luar Negeri adalah ***“Melalui Diplomasi Total, Ikut Mewujudkan Indonesia Yang Bersatu, Aman, Adil, Demokratis, dan Sejahtera”*** yang memiliki arti sebagai berikut:

- a. Diplomasi Total adalah instrumen dan cara yang digunakan dalam diplomasi yang melibatkan seluruh komponen stakeholders dan memanfaatkan seluruh lini kekuatan bangsa (*multi-track diplomacy*).
- b. Ikut Mewujudkan adalah keinginan untuk merealisasikan dan menuntaskan gagasan, ide, dan sesuatu yang belum ada atau masih berada di tengah jalan.
- c. Indonesia Yang Bersatu adalah menggambarkan keinginan yang kuat untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan Indonesia.
- d. Aman, Adil, Demokratis, dan Sejahtera adalah konsep yang diberikan Presiden Indonesia saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tujuan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri pada akhirnya dapat memberikan rasa aman, adil, demokratis, dan lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia.

Departemen Luar Negeri mempunyai misi yang disebut dengan ***“Sapta Dharma Charaka”*** yang meliputi:

1. Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia;
2. Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerjasama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi;

3. Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang;
4. Memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme;
5. Meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia;
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat dan rekonstruksi Aceh dan Nias dari bencana gempa dan tsunami;
7. Melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peran utama dalam koordinasi penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.

3.1.3 Tugas Departemen Luar Negeri

Tujuan pokok Departemen Luar Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri merupakan koordinator hubungan luar negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, ditetapkan bahwa Menteri Luar Negeri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Hal yang sama juga dijelaskan dalam pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Politik dan Hubungan Luar Negeri.

3.1.4 Fungsi Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri menjalankan fungsinya seperti yang tertera pada pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999, yang ditetapkan bahwa Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang politik luar negeri.
- b. Pelaksana urusan pemerintah sesuai dengan tugasnya.
- c. Bertanggung jawab atas pengelolaan barang dan kekayaan negara.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

3.1.5 Wewenang Departemen Luar Negeri

Kewenangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia meliputi:

- a. Pelaksanaan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- b. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- c. Pengaturan perjanjian dan persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara.

Adapun ketentuan Departemen Luar Negeri sesuai yang tertera dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan penerangan luar negeri.
- b. Pengaturan keprotokoleran dan kekonsileran.

3.1.6 Nilai-Nilai Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri memiliki nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Profesionalisme

Para pejabat Departemen Luar Negeri adalah profesional yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara pro-aktif dan inovatif yang didasarkan atas keahlian dan keterampilan yang tepat, termasuk penguasaan bahasa asing dan pemahaman terhadap budaya setempat. Selain itu

terkandung pula pengertian produktifitas, yakni kemampuan menggabungkan pemanfaatan semaksimal mungkin semua sumber daya yang tersedia melalui proses tepat (efisiensi) sehingga membuahkan hasil yang paling memuaskan (efektifitas).

b. Moral dan Etika

Setiap pejabat Departemen Luar Negeri menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Agama.

c. Kemitraan

Pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri RI membutuhkan kerjasama dan dukungan berbagai keahlian dari berbagai unit Departemen Luar Negeri maupun instansi lainnya serta lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra seajar. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi harus mendapat prioritas yang tinggi. Perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan merupakan hal yang positif yang harus dinyatakan secara terbuka dan konstruktif dalam rangka memperkuat formulasi dan pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri.

d. Disiplin, Dedikasi dan Loyalitas

Pegawai Departemen Luar Negeri melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan disiplin dan dedikasi yang tinggi serta setia kepada organisasi, atasan dan rekan-rekan kerja lainnya.

e. Integritas

Kepribadian yang jujur, arif, terpercaya serta teguh dalam pendirian.

f. Orientasi Pelayanan

Untuk memajukan kepentingan negara dan warganegara Indonesia di dalam dan di luar negeri, setiap pejabat Departemen Luar Negeri wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada segenap lapisan masyarakat yang memerlukan.

g. Transparansi

Setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara intern organisasi maupun kepada masyarakat luas sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial.

h. Akuntabel

Hasil kinerja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mempunyai wewenang meminta pertanggungjawaban.

i. Jiwa Kejuangan Tinggi

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan nasional dengan membina persahabatan dengan sebanyak mungkin bangsa di dunia, diabdikan untuk kepentingan nasional dengan dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap dan gigih serta pantang menyerah dalam upaya tetapi luwes dan rasional dalam pendekatan.

j. Keahlian

Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berdiplomasi, pengalaman internasional dan kemampuan manajerial dalam rangka memainkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional.

k. Asas Manfaat

Seluruh kegiatan dan hasil-hasilnya diperhitungkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan atau misi organisasi dalam rangka memberikan sumbangan yang semaksimal mungkin untuk kepentingan nasional.

3.1.7 Struktur Organisasi Departemen Luar Negeri

Secara hirarkhi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang dibantu oleh 10 pejabat eselon I, 4 staff ahli setingkat eselon I, 55 formasi eselon II, 207 formasi pejabat eselon III, dan 669 formasi pejabat eselon IV. Secara umum unit-unit kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02A/OT/VIII/2005/01 tahun 2005 per tanggal 19 Agustus 2005 adalah terdiri dari sebagai berikut:

1. Menteri Luar Negeri

2. Sekretaris Jenderal

- Biro administrasi Menteri
- Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan
- Biro Perencanaan dan Organisasi

- Biro Kepegawaian
- Biro Keuangan
- Biro perlengkapan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- Pusat komunikasi

3. Direktorat Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika

- Sekretariat Direktorat Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika
- Direktorat Asia Timur dan Pasifik
- Direktorat Asia Selatan dan Tengah
- Direktorat Afrika
- Direktorat Timur Tengah
- Direktorat Kerjasama Intra kawasan Aspasaf

4. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

- Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
- Direktorat Amerika Utara dan Tengah
- Direktorat Amerika Selatan dan Karibia
- Direktorat Eropa Barat
- Direktorat Eropa Tengah dan Timur
- Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Amerop

5. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN

- Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama Asean
- Direktorat Politik-Keamanan ASEAN
- Direktorat Jenderal Kerjasama Ekonomi ASEAN
- Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN
- Direktorat Mitra Wicra dan Antar Kawasan

6. Direktorat Jenderal Multilateral

- Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral
- Direktorat Keamanan Internasional dan Peucutan Senjata
- Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan
- Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual

- Direktorat Negara Berkembang

7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

- Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi, dan Diplomasi Publik
- Direktorat Informasi dan Media
- Direktorat Diplomasi Publik
- Direktorat Keamanan Diplomatik
- Direktorat Kerjasama Teknik

8. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

- Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
- Direktorat Hukum
- Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan
- Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya

9. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

- Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
- Direktorat Protokol
- Direktorat Konsuler
- Direktorat Fasilitas Diplomatik
- Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

10. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

- Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kawasan Amerika dan Eropa
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pada Organisasi Internasional

11. Inspektorat Jenderal

- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat Wilayah I
- Inspektorat Wilayah II
- Inspektorat Wilayah III
- Inspektorat Wilayah IV

12. Staf Ali Menteri

- Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
- Staf Ahli Bidang Manajemen

3.2 Gambaran Umum Direktorat BPPK

3.2.1 Pernyataan Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Luar Negeri, BPPK merumuskan visi periode 2005-2009 sebagai berikut :

“Mewujudkan BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri yang kredibel dalam mendukung diplomasi total”

Pernyataan visi di atas menegaskan komitmen yang jelas dan terarah tentang masa depan organisasi BPPK sebagai unit kerja di lingkungan Deplu yang memiliki fungsi pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri.

- ***BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri*** artinya BPPK dalam lingkup Departemen Luar Negeri, memiliki tugas pokok dan kewenangan melakukan pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri.
- ***Kredibel*** mempunyai arti bahwa hasil-hasil kajian di bidang kebijakan luar negeri mencakup berbagai isu mutakhir di tingkat nasional, regional dan global sehingga akurat, terpercaya dan relevan dengan dinamika hubungan internasional.
- ***Mendukung Diplomasi Total*** artinya baik dalam pelaksanaan maupun dalam merumuskan hasil pengkajian seoptimal mungkin melibatkan seluruh *stakeholder* dan mencakup berbagai isu secara komprehensif dan integratif.

3.2.2 Pernyataan Misi

Sebagai penjabaran visi yang telah dikemukakan di atas, maka BPPK menggariskan misi organisasi yang secara nyata menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan peran strategis institusi sebagai unit pengkajian dan pengembangan kebijakan yang berkualitas.
- Meningkatkan cakupan dan substansi bahasan/kajian sehingga menghasilkan kajian kebijakan luar negeri yang relevan dengan dinamika perkembangan domestik dan internasional.
- Meningkatkan kualitas pengkajian dan pengembangan kebijakan melalui *Policy Planning Consultations* dengan lembaga sejenis di Kemlu negara-negara sahabat serta partisipasi pada sidang-sidang internasional.
- Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan unit-unit operasional di Deplu, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pengkajian, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah di dalam dan di luar negeri.
- Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kepastakaan dan dokumentasi untuk kepentingan pengkajian.
- Mengoptimalkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, administrasi umum dan keuangan.

3.2.3 Tugas dan Fungsi BPPK

Berdasarkan SK Menlu No. 02A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 per tanggal 19 Agustus 2005, dijelaskan bahwa BPPK mempunyai tugas untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri. Sesuai tugas yang diemban, maka BPPK melakukan tugas penelitian dan pengembangan kebijakan. Output yang dihasilkan berupa *policy planning* dan *policy review* yang akan direkomendasikan kepada Departemen Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sebagai pengambil kebijakan. Direktorat BPPK mempunyai fungsi yang diantaranya :

- Menyiapkan bahan masukan bagi perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
- Melaksanakan kebijakan dan pengkajian serta pengembangan sesuai Perpu yang berlaku.
- Merumuskan kebijakan dan pengembangan kebijakan sebagai standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pengembangan kebijakan.

- Pemberian pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi terhadap pengelola perpustakaan dan dokumentasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

3.2.4 Tujuan BPPK

Dalam upaya pencapaian visi dan misi, maka BPPK menjabarkannya dalam beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi BPPK sebagai salah satu pertimbangan utama pimpinan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.
2. Meningkatkan hasil kajian kebijakan luar negeri yang relevan dengan dinamika perkembangan domestik dan internasional.
3. Meningkatkan kualitas pengkajian dan pengembangan kebijakan melalui *Policy Planning Consultations* dengan lembaga sejenis di Kemlu negara-negara sahabat serta partisipasi pada sidang-sidang internasional.
4. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan unit-unit operasional di Deplu, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pengkajian, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah di dalam dan di luar negeri.
5. Mengoptimalkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana, pemeliharaan gedung kantor serta administrasi umum dan pengelolaan keuangan.
7. Memanfaatkan secara optimal bahan-bahan referensi kepustakaan dan dokumentasi untuk kepentingan pengkajian.

3.2.5 Sasaran BPPK

Berdasarkan tujuan diatas, maka BPPK menetapkan sasaran-sasaran sebagai indikator pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Dimanfaatkannya rekomendasi BPPK sebagai salah satu bahan pertimbangan pimpinan Deplu dalam pengambilan kebijakan luar negeri.
2. Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan luar negeri yang relevan dengan dinamika perkembangan domestik dan internasional.

3. Meningkatnya kualitas pengkajian dan pengembangan kebijakan melalui kerjasama dengan lembaga sejenis di Kemlu negara-negara sahabat dalam bentuk *Policy Planning Consultations*, serta partisipasi pada sidang-sidang internasional.
4. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan unit-unit operasional di Deplu, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pengkajian, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah di dalam dan di luar negeri.
5. Optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya manusia.
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, pemeliharaan gedung kantor dan pengelolaan tertib administrasi umum dan keuangan.
7. Dimanfaatkannya secara optimal bahan-bahan referensi kepustakaan dan dokumentasi untuk kepentingan pengkajian.

3.2.6 Program

Selaras dengan program utama dan program pendukung Departemen Luar Negeri serta identifikasi penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan BPPK, maka BPPK menetapkan 5 (lima) Program dalam Rencana Strategik Tahun 2004 - 2009, yaitu :

1. **Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia**, antara lain dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama penelitian dan pengkajian dengan perguruan tinggi di dalam negeri.
2. **Program Peningkatan Kerjasama Internasional**, antara lain dilaksanakan melalui kegiatan *Policy Planning Consultations* dengan lembaga-lembaga sejenis pada Kemlu negara sahabat dan keikutsertaan pada sidang internasional.
3. **Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**, dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan kelompok ahli, forum dialog/diskusi, lokakarya, dan penyelenggaraan debriefing mantan Kepala Perwakilan RI.

4. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**, melalui pelaksanaan penyediaan dan pengadaan peralatan kantor dan peningkatan perawatan gedung kantor.
5. **Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan**, melalui penyelenggaraan operasional perkantoran, pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan kerjasama antar instansi pemerintah serta penyelenggaraan perpustakaan dan penyediaan bahan-bahan referensi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

3.2.7 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPPK dipimpin oleh seorang Kepala Badan dibantu oleh 4 (empat) pejabat Eselon II yang membawahi unit-unit:

1. **Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;**
yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang rencana dan program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan penerbitan.
2. **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika;**
yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika.
3. **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa;**
yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa.

4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional;

yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional dan global.

3.3 Gambaran Umum Penerapan SIM di Departemen Luar Negeri

3.3.1 Azas-azas Sistem Informasi dan Komunikasi Departemen Luar Negeri

a. *Azas One door policy*

Demi meningkatkan keamanan dan tertib administrasi, pengiriman berita resmi hanya dilakukan oleh Puskom dan Unit Komunikasi Perwakilan RI.

b. *Azas Keamanan*

Berita resmi baik terbuka / biasa maupun rahasia hanya boleh diperlihatkan kepada pihak yang terkait langsung (pengirim dan penerima sesuai alamat).

c. *Azas Pembakuan*

Guna keseragaman dan otentikasi, setiap berita resmi, baik terbuka (biasa) maupun rahasia dibuat dan diproses menurut tatacara dan aturan baku yang telah ditetapkan. (Pedoman Tata Naskah Dinas Deplu dan Perwakilan RI di Luar Negeri).

d. *Azas Legalitas*

Pengiriman berita resmi harus melalui proses legalisasi oleh pejabat yang diberi wewenang melakukannya.

e. *Azas Kecepatan dan Ketepatan*

Pengiriman berita dilakukan melalui media yang sesuai dengan mempertimbangkan kecepatan dan ketepatan.

3.3.2 Dasar Penerapan SIM di Departemen Luar Negeri Direktorat BPPK

Secara umum Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menetapkan pedoman pokok, arah program dan kebijakan sesuai fungsinya sebagai institusi *policy analysis* dan

policy development, yang diabadikan pada kepentingan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menggariskan peran Menteri Luar Negeri dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri. Atas dasar demikian, disusunlah Rencana Strategik Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, yang saat ini periodenya antara tahun 2004 – 2009.

Di dalam renstra tersebut tertuang visi dan misi dari BPPK Deplu RI. Visi BPPK tersebut adalah ***“Mewujudkan BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri yang kredibel dalam mendukung diplomasi total”***. Atas dasar visi tersebut BPPK Deplu melaksanakan tugas pokoknya dalam melakukan pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri; dengan hasil-hasil kajian di bidang kebijakan luar negeri mencakup berbagai isu mutakhir di tingkat nasional, regional dan global sehingga akurat, terpercaya dan relevan dengan dinamika hubungan internasional; serta baik dalam pelaksanaan maupun dalam merumuskan hasil pengkajian seoptimal mungkin melibatkan seluruh *stakeholder* dan mencakup berbagai isu secara komprehensif dan integratif.

Misi dari BPPK sesuai dengan renstranya adalah mengoptimalkan peran strategis institusi sebagai unit pengkajian dan pengembangan kebijakan yang berkualitas; meningkatkan cakupan dan substansi bahasan/kajian sehingga menghasilkan kajian kebijakan luar negeri yang relevan dengan dinamika perkembangan domestik dan internasional; meningkatkan kualitas pengkajian dan pengembangan kebijakan; mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan unit-unit operasional di Deplu, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pengkajian, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah di dalam dan di luar negeri; mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kepustakaan

dan dokumentasi untuk kepentingan pengkajian; dan mengoptimalkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, administrasi umum dan keuangan. Misi yang di emban oleh BPPK Deplu sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak lain adalah dalam rangka Menyiapkan bahan masukan bagi perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; Melaksanakan kebijakan dan pengkajian serta pengembangan sesuai Perpu yang berlaku; Merumuskan kebijakan dan pengembangan kebijakan sebagai standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pengembangan kebijakan; Pemberian pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi terhadap pengelola perpustakaan dan dokumentasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Berdasar pada surat keputusan (SK) Menlu No. 02A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 per tanggal 19 Agustus 2005, menjelaskan bahwa BPPK mempunyai tugas untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri. Atas dasar demikian, maka BPPK melakukan tugas penelitian dan pengembangan kebijakan. Output yang dihasilkan berupa *policy planning* dan *policy review* yang akan direkomendasikan kepada Departemen Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sebagai pengambil kebijakan. Maka dari itu dalam menunjang tugas dan fungsi BPPK Deplu perlu didukung oleh pengelolaan informasi yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Pengelolaan informasi melalui SIM untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya dalam penjabaran misi dan fungsi BPPK Deplu tersebut secara tersirat telah menggariskan mengenai landasan operasional penerapan SIM.

3.3.3 Alur penerapan SIM di Departemen Luar Negeri

Guna menunjang kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat proses penyelenggaraan sistem informasi pada Departemen Luar Negeri di mandatkan pada kelembagaan khusus yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Departemen Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan dan pengamanan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI. Untuk itu berlandaskan pada Permenlu No.

02/A/OT/VIII/2005/01, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri pasal 1041, kelembagaan khusus yang dimaksud dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pengelolaan sistem informasi dimandatkan pada unit Pusat Komunikasi (PUSKOM).

Gambar III.1

Alur Komunikasi dan Informasi Departemen Luar Negeri

Laporan mingguan
perwakilan RI di luar

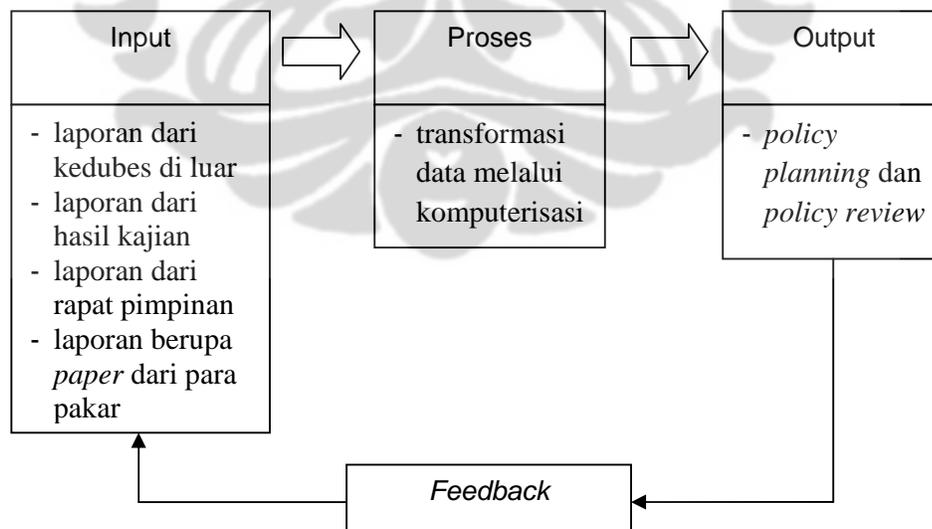
Puskom perwakilan RI
di luar



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2008

Secara umum sumber informasi pada Departemen Luar Negeri di bagi menjadi dua, yakni sumber informasi yang berasal dari internal organisasi dan sumber informasi yang berasal dari eksternal organisasi. Informasi yang berasal dari internal organisasi di dapat dari perwakilan Deplu di luar, melalui kedubes yang tersebar di berbagai negara. Mekanisme pelaporan dari kedubes RI dilakukan setiap minggu yang mencermati perkembangan ekopolsosbud dari negara yang bersangkutan. Laporan itu kemudian diteruskan kepada pusat komunikasi untuk kemudian disampaikan kepada kantor pusat yang ada di Jakarta. Dalam menjalankan fungsinya ini pusat komunikasi melakukan pengamanan bukan hanya dari sisi teknologi saja tapi yang paling penting justru di sisi kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga rahasia negara. Puskom Departemen Luar Negeri kemudian melakukan penyortiran dan pengklasifikasian informasi sesuai tingkat kerahasiaan dari informasi yang bersangkutan, untuk kemudian diteruskan kepada masing-masing unit terkait. Informasi yang di terima dari unit Puskom menjadi input bagi direktorat BPPK dalam melakukan tugas penelitian dan pengembangan kebijakan luar negeri. Informasi yang masuk untuk direktorat BPPK diterima oleh kepala badan yang kemudian diteruskan kepada unit sekretariat untuk dilakukan penyortiran data.

Gambar III.2
Penerapan SIM Pada Direktorat BPPK



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2008

Sekretariat BPPK bertanggung jawab dalam penerimaan, pengklasifikasian, penyebaran informasi bagi unit-unit lain. Input data bagi direktorat BPPK berupa informasi semua laporan, yakni ; laporan dari kedubes di luar, laporan dari hasil kajian, laporan dari rapat pimpinan, dan laporan berupa *paper* dari para pakar. Selanjutnya input data tersebut kemudian diproses berdasar pada skala proritas, sebagai salah satu mekanisme perwujudan *bottom up* dalam merumuskan kebijakan luar negeri melalui pengelolaan dan pengolahan informasi SIM secara komputerisasi. Namun sayangnya transformasi data secara komputerisasi pada direktorat BPPK masih bersifat semi konvensional setengah komputerisasi, artinya keberadaan perangkat keras yang relatif baru belum dimanfaatkan secara maksimal guna menunjang produktivitas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Pada akhirnya output yang dihasilkan berupa *policy planning* dan *policy review*, berupa suatu bentuk gambaran singkat tentang hasil kajian yang akan direkomendasikan kepada Departemen Luar Negeri Menteri Luar Negeri sebagai pengambil kebijakan.

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PADA DIREKTORAT BPPK
DEPARTEMEN LUAR NEGERI

1.1 Efektivitas Penerapan SIM Pada Direktorat BPPK

Secara umum manfaat suatu sistem yang baik adalah adanya prosedur yang jelas, bagian yang satu dengan bagian yang lain terintegrasi, semua proses berlangsung lebih cepat dan akurat, sehingga secara keseluruhan organisasi menjadi lebih efisien. Dengan adanya peningkatan efisiensi maka organisasi tersebut dapat berkompetisi dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah bagi kepentingan bangsa Indonesia. Hanya mereka (organisasi) yang bekerja dengan prinsip *doing things right* (efisien) dan *doing right things* (efektif) yang dapat menjawab tantangan global, untuk menghasilkan output yang optimal dalam meningkatkan produktivitas yang maksimal dengan mengeluarkan biaya yang minimal. Kebutuhan informasi yang cepat, tepat, dan terpadu semakin memegang peranan penting sebagai pendukung serangkaian kegiatan dalam rangka mengoptimalkan proses perumusan kebijakan. Kemampuan untuk membuat perkiraan keadaan dalam perumusan suatu kebijakan, secara sistem haruslah didukung dengan adanya informasi yang terdapat dalam organisasi sudah terorganisir dengan baik. Informasi yang terorganisir dengan baik akan membantu suatu organisasi mengantisipasi lingkungannya yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Struktur organisasi dan kebutuhan informasi memiliki hubungan erat yang saling berkaitan. Struktur organisasi dapat dianalogikan sebagai anatomi manusia dan sistem informasi sebagai sistem syarafnya. Masing-masing unit organisasi saling berhubungan melalui saluran-saluran informasi dan komunikasi. BPPK dalam menjalankan tugas pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri dari waktu ke waktu semakin dihadapkan pada tantangan agar senantiasa meningkatkan kemampuannya untuk memberikan rekomendasi bagi Departemen

Luar Negeri dalam merumuskan kebijakan berupa *policy planning* dan *policy review*. Dengan demikian suatu SIM yang efektif dan efisien dapat dikatakan suatu kegiatan yang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, dengan alokasi sumber daya tertentu secara optimal sehingga target yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Hal ini diungkapkan oleh Kepala SubBagian Pusat Kajian Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) sebagai berikut :

“Dalam mendukung kinerja organisasi, penerapan SIM atau pengelolaan dan pengolahan informasi adalah suatu keharusan bagi organisasi guna memperoleh kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu. Bagi BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri penerapan SIM akan banyak membantu dalam memperoleh bahan masukan dalam perumusan kebijakan. Selain itu penerapan SIM juga dimaksudkan dalam hal meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja, memberikan laporan yang lebih akurat dan cepat, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas organisasi, meningkatkan partisipasi dari user, serta meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Oleh Karena itu upaya pemantapan fungsi tersebut perlu didukung oleh sistem informasi manajemen yang efektif”.¹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan SIM yang efektif bagi direktorat BPPK menjadi keharusan prioritas dalam memperoleh kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dikarenakan informasi yang cepat dan akurat menjadi tolak ukur bagi BPPK dalam melakukan tugas dan fungsinya terhadap suatu kajian yang berkualitas yang mampu memberikan laporan yang lebih akurat dan cepat, melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas organisasi, meningkatkan partisipasi dari *user*, serta meningkatkan produktivitas menggunakan sistem aplikasi teknologi informasi

¹ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

yang mampu memproses transaksi dan pengambilan keputusan secara otomatis secara keseluruhan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengembangan SIM yang efektif dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan idealnya adalah terbentuk sebagai suatu rangkaian atas subsistem-subsistem yang didasarkan pada berbagai fungsi kegiatan.

1.1.1 *System Approach and Sub-System Concept*

Organisasi bersifat dinamis, sering mengalami perubahan yang disebabkan antara lain oleh perubahan kepemimpinan, perubahan lingkungan, perkembangan atau penurunan kegiatan organisasi secara dramatis. Sebaliknya SIM bersifat statis karena mempunyai struktur dan proses yang merefleksikan suatu pengertian terhadap kebutuhan suatu organisasi pada saat sistem itu dikembangkan. Namun demikian organisasi dan SIM saling mempengaruhi satu sama lain, dalam arti jika organisasi mengalami perubahan maka SIM pun juga akan berubah. Dalam hal ini SIM dapat dipandang sebagai gabungan sistem-sistem informasi, suatu sistem organisasi. Oleh karenanya dalam menganalisis efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK yakni dengan melihat hubungan elemen *hardware*, *software*, *SDM*, *network* terorganisasi saling bergantung satu sama lain. Pada sisi lain SIM terdiri dari subsistem-subsistem yang pada akhirnya membentuk *unified system*, dimana setiap subsistem ini berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan. Subsistem-subsistem yang ada diintegrasikan, sehingga aktivitas dari setiap subsistem berkaitan dengan subsistem lainnya. Efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK dapat dilihat sebagai subsistem saling berinteraksi satu sama lain dan terpadu dalam satu sistem keseluruhan di Deplu.

Tujuan dari penerapan SIM dalam suatu organisasi adalah membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan akurat guna meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan. Dalam menganalisis sistem, yang perlu diperhatikan adalah menetapkan sebaik apa sistem tersebut mencapai sasarannya. Bila terdapat perbedaan-perbedaan atau penyimpangan, maka perlu dipelajari rinci dan kemudian dibuat suatu usulan yang khusus untuk memperbaiki sistem tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pengembangan SIM dalam suatu organisasi haruslah mendukung

alasan dan tujuan pembentukan organisasi. Maka dari itu untuk mengetahui kinerja dari suatu SIM yang telah berjalan, perlu dilakukan evaluasi sejauh mana SIM tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah yang dilakukan adalah tinjauan terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan memahami keadaan sistem yang sedang berjalan. Hasil yang diinginkan dari langkah ini adalah mendapatkan gambaran secara rinci tentang fungsi dan aktivitas yang ada dan kebutuhan akan informasi antar unit terkait, dimana hasil ini nantinya digunakan sebagai acuan dan bahan masukan untuk penyempurnaan dari sistem yang ada.

4.1.1.1 Komponen Fisik

a. Hardware

Perangkat keras (*hardware*) yang dimaksud adalah komputer beserta kelengkapan *tools* pendukung lainnya yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data sekaligus sebagai sarana penyimpanan data menjadi terminal masukan dan keluaran. Setiap perangkat keras atau alat komputer memiliki spesifikasi dan karakteristik yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Penggabungan perangkat-perangkat tersebut ke dalam sebuah sistem atau ke dalam sebuah jaringan memerlukan alat penghubung (*interface*) dan protokol standar yang dapat menjamin keterhubungan (kompatibilitas) di antara perangkat. Standar atau kriteria teknis yang dapat diikuti oleh semua perangkat yang terkait memungkinkan sistem dapat beroperasi secara benar dan pengguna terhindar dari kerugian akibat pemakaian perangkat yang tak berkecocokan. Kehadiran komputer serta pendukung lainnya sangat membantu bahkan sangat diperlukan dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, sehingga bagi Direktorat BPPK kehadiran perangkat komputer yang memadai semakin dirasakan sebagai kebutuhan yang harus diprioritaskan pengadaannya guna menunjang terwujudnya efektivitas dalam proses pembuatan keputusan. Perangkat keras yang dimaksud berdasarkan fungsinya dalam efektifitas penerapan SIM pada Direktorat BPPK terdiri :

1. Perangkat Pemasukan

Perangkat pemasukan data atau instruksi komputer yang paling populer terdiri dari papan tombol (*keyboard*) serta selalu disertai

dengan monitor (*display screen*) sebagai peralatan output untuk memantau apakah pemasukan data sudah benar. Kombinasi antara monitor dengan *keyboard* digunakan untuk memasukan data transaksi langsung ke dalam sistem komputer, kemudian disimpan dalam memori sekunder. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bisa dikatakan bahwa ketersediaan perangkat keras dalam unit masukan sudah cukup banyak dan relatif masih baru. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

*“.....berbicara mengenai kesiapan perangkat keras (hardware) kita mempunyai ketersediaan jumlah komputer yang cukup banyak, kalau dilihat dengan spesifikasinya relatif baru kelas Pentium IV ke atas. Unit masukan kita persenjatai dengan monitor flat baru, yang dirasakan sudah cukup capable untuk pelaksanaan SIM secara komputerisasi. Namun yang belum kita punya adalah server yakni sebagai penghubung dan pengatur sistem informasi di kita. Sehingga jika dilihat ketersediaan unit komputer di kita baru sebatas membantu pengerjaan kegiatan sehari-hari”.*²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi yang dilakukan masih bersifat konvensional setengah komputerisasi, artinya keberadaan perangkat keras yang relatif baru belum dimanfaatkan secara maksimal guna menunjang produktivitas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Saat ini pemanfaatan komputer yang ada masih merupakan alat bantu yang berguna untuk mempercepat proses maupun agar pekerjaan menjadi lebih rapi, dimana penggunaannya masih terbatas untuk menggantikan fungsi mesin ketik, sedangkan ketersediaan program-program aplikasi perangkat lunak belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Padahal kenyataan membuktikan bahwa kegiatan organisasi akan lebih cepat

² Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

dan sistematis serta dapat memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi, dimana nilai investasi yang ditanamkan relatif menjadi lebih murah bila disertai penggunaan *software* pendukung.

2. Perangkat Pemroses

Perangkat pemroses data melakukan komputerisasi, membandingkan dan menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan melalui pemasukan data atau perintah. Unit pemrosesan sentral atau disebut CPU (*central processing unit*) terdiri atas tiga bagian utama, yaitu : memori utama, unit pengendali (*control unit*) dan unit logika aritmetika (ALU). Unit pengendali akan menerima dan menguraikan (*decode*) perintah dari program serta menafsirkan perintah dari memori sistem. Memori utama akan menyimpan data yang menunggu pemrosesan oleh ALU. Sedangkan ALU menjalankan perintah dalam melaksanakan seluruh perhitungan dan perbandingan logis dari seluruh sistem komputer yang telah ditafsirkan. Hasil pengamatan dilapangan pemakaian perangkat keras belum diberdayakan secara optimal, dimana keberadaan komponen yang canggih belum didukung dengan sistem jaringan *online* yang terhubung pada masing-masing *workstation/PC* di unit BPPK. Sehingga dirasakan kesulitan dalam masalah koordinasi serta *sharing knowledge* dalam pengembangan organisasi kedepan. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional sebagai berikut:

“Seperti yang mas lihat, BBPK baru mengalami proses peremajaan dengan menyesuaikan komponen spesifikasi komputer terbaru. Peremajaan ini tidak lain ditujukan dalam mendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang kami laksanakan. Masing-masing komputer telah dilengkapi dengan processor intel dual core 3.0 Ghz yang didukung dengan kapasitas memori RAM 1 GB dan video graphic card ATI Radeon 9550 GT 256 MB. Cuma yang menjadi kendala adalah pengembangan jaringan intranet. Kita mau informasi itu tidak hanya berada di komputer masing-masing, kita mau semua informasi itu ada di dalam satu server

yang bisa di akses kepada seluruh pegawai BPPK dengan tingkatan administrasi yang berbeda-beda. Misalnya eselon I dan II dapat mengakses informasi secara keseluruhan, tetapi untuk eselon III dan IV hanya beberapa informasi yang bisa di akses. Semua bisa melakukan edit, dimana ada administratornya yang mengurus hal tersebut”.³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan informasi masih bersifat spesifik bagi masing-masing unit. Walaupun sudah diterapkan sistem *database* terhadap pengelolaan dan pengolahan informasi, namun sangat disayangkan belum terhubung satu unit dengan yang lain. Sehingga sangat menyulitkan dalam hal koordinasi pada masing-masing unit.

3. Perangkat Penyimpanan

Suatu *central unit* dalam melakukan pemrosesan data tentunya juga harus melakukan penyimpanan data dari jutaan *byte* secara permanen. Dalam pengoperasiannya aktivitas ini dilakukan oleh memori utama yang melakukan penyimpanan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Untuk itu aktivitas memori utama ini perlu didukung oleh memori sekunder yang bertujuan agar secara ekonomis dapat menyimpan data yang secara cepat dapat dipindahkan ke dalam memori utama. Sehingga diperlukan perangkat untuk menyimpan data yang bersifat permanen yakni seperangkat magnetic berupa disk (*hard disk, flash disk, floppy disk*). Kelengkapan perangkat penyimpanan pada direktorat BPPK sudah ditunjang dengan kapasitas memori yang cukup besar dalam melakukan penyimpanan informasi (*storage of information*). Penyimpanan informasi melalui sistem *database* akan sangat memudahkan BPPK dalam melakukan kajian terhadap

³ Wawancara dengan Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional (OI) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

pemenuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

*“Penerapan SIM yang dilakukan oleh BPPK masih relatif baru, sehingga belum bisa dirasakan sampai sejauh ini dari segi positif dan negatif. Kalo dilihat dari segi positifnya beberapa kawan tidak lagi memperoleh kesulitan dalam melakukan pencarian informasi yang bersangkutan, karena sudah ada sistem database. Informasi biasanya kami dapat dari surat kawat berasal dari perwakilan KBRI di luar, informasi yang masuk kami catat secara manual sesuai dengan kategori biasa atau rahasia. Bila dilihat perlu dilakukan tinjauan atas substansi surat kawat tersebut baru kemudian kami lakukan kajian terhadap berita tersebut. Tapi yang terpenting adalah sudah dilakukan sistem database hasil informasi surat kawat yang masuk dan ini dilakukan pada masing-masing unit di BPPK”.*⁴

Pernyataan Bapak Wahyu di atas mengindikasikan bahwa penyediaan kapasitas memory yang besar akan memudahkan dalam melakukan penyimpanan informasi (*storage of information*) melalui sistem informasi *database*. Sehingga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pencarian informasi yang dimaksud. Menurut peneliti dengan adanya penyimpanan data (*storage of information*) dalam satu wadah yang didukung oleh kemampuan penyimpanan dalam jumlah yang besar, akan memberikan keuntungan dalam hal pembakuan struktur data ke seluruh pengguna (*user*) hingga akan tercipta suatu kesatuan konsep, dalam artian bahwa data yang dipakai mengandung arti yang sama.

⁴ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

4. Perangkat Keluaran

Mesin pencetak (printer) dan monitor video merupakan perangkat keluaran yang paling sering digunakan. Penambahan sebuah printer akan memudahkan operator mengimputkan data di terminal, melihat cetakan di layar monitor, dan sekaligus memperoleh data tercetak. Jenis perangkat keluaran lain adalah *plotter* yang berfungsi sebagai piranti output untuk menghasilkan gambar grafik, peta, dan bagan yang canggih; kamera untuk membuat slide; *mikrofilm*; dan pencetakan *bar code* untuk dibaca dengan *scanner optic*. Perangkat keluaran pada BPPK sendiri pada setiap *workstation/PC* sudah dilengkapi dengan paket printer dalam memberikan output laporan berupa *hardcopy*. Hal ini tentunya akan mempermudah bagi setiap pegawai dalam melakukan tugasnya masing-masing. Oleh karenanya fungsi perangkat keluaran dalam pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM merupakan suatu komponen utama dalam mewujudkan penerapan SIM yang efektif yang berkaitan dengan mempercepat proses laporan, khususnya dalam hal kajian yang dilakukan oleh unit BPPK.

a. *Software*

Disamping *hardware*, *software* sebagai pendukung utama dalam fungsi operasi sistem komputer, yakni mencakup sistem pengoperasian atau sistem manajemen data yang memuat aplikasi berbagai program yang secara spesifik dibuat untuk mempercepat dan mempermudah penyajian informasi. *Software* merupakan program dari komputer yang terdiri dari dua jenis program sistem dan program aplikasi.

1. Program Sistem

Perangkat keras komputer harus dikelola oleh *software* komputer yang dikenal dengan nama program sistem. Tanpa program sistem maka perangkat keras tidak akan dapat berfungsi. Tujuan utama dari serangkaian program ini adalah untuk mengelola pekerjaan—sistem pengoperasian yang akan memulai, menjadwalkan, memantau, mengendalikan berbagai pekerjaan di dalam sistem komputer. Program sistem menjembatani perangkat keras dengan program-program

aplikasi. Program sistem yang paling mendasar adalah sistem operasi (*operating system*) yang mengendalikan akses program-program lain terhadap *central processing unit* (CPU) dan perangkat keras yang lain. Dalam pengoperasiannya direktorat BPPK ditunjang oleh sistem operasi windows dan masih belum ada rencana untuk beralih ke oprasi sistem lain seperti Linux, Macintosh, MS DOS ataupun sistem operasi lainnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

*“Sistem operasi yang kita gunakan adalah sistem operasi windows dan belum ada rencana untuk beralih ke sistem operasi lain. hal ini dikarenakan masalah ketergantungan, yakni sistem operasi windows dirasakan lebih friendly dioperasikan bila dibandingkan dengan sistem operasi lainnya”.*⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional sebagai berikut:

*“Mulai dari pengadaan perangkat keras sampai pengoperasiannya, kami biasa menerima satu paket sistem operasi windows dalam perangkat keras yang kami terima. Satu hal yang kami rasakan adalah mengenai kemudahan dalam pengoperasiannya, serta tidak sulit dalam penambahan sistem aplikasi pada sistem operasi windows”.*⁶

Dari kedua pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan sistem operasi windows dibanding sistem operasi lain adalah mengenai kemudahan dalam hal pengoperasiannya, selain juga dirasakan tidak terlalu sulit bila ingin menambahkan sistem aplikasi dalam pengoperasian sistem tersebut. Menurut peneliti proses penerapan dan pengembangan SIM berdasar pada kebutuhan dari suatu organisasi akan mempermudah dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

⁵ *Ibid.*

⁶ Wawancara dengan Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internaional (OI) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

Hal ini menyangkut kesiapan SDM sebagai pengguna (*user*) dalam pengoperasian sistem komputer tersebut. Sehingga akan memberikan nilai tambah dalam hal efisiensi dan efektivitas suatu organisasi.

2. Program Aplikasi

Penerapan program sistem pada suatu CPU saja tidak cukup dalam mendukung aktivitas kegiatan pengoperasian, dimana dalam mendukung efektivitas pengoperasian tersebut juga diperlukan aplikasi tambahan. Program aplikasi digunakan untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada organisasi. Pada umumnya program-program tersebut digunakan untuk keperluan individu. Secara umum unit BPPK belum menerapkan program aplikasi guna mendukung kegiatannya dalam melakukan kajian terhadap suatu permasalahan. Hal ini senada dengan pendapat dari Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional yang menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini belum ada software aplikasi khusus dalam mendukung kinerja produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dimana aktivitas organisasi belum didukung oleh aplikasi khusus dalam mempercepat proses. Sehingga proses pengoperasiannya lebih cenderung bersifat intuisi atau berdasar pengalaman dengan melihat skala prioritas. Misalnya saja untuk tahun 2009 kita berfokus untuk penyelesaian masalah perbatasan, sejauh mungkin penyelesaian masalah perbatasan selesai, seperti halnya kasus ambalat. Pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan win-win solution, dimana sama-sama menguntungkan bagi kedua negara. Dalam melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut belum ada dukungan dari program aplikasi khusus dalam memutuskan keputusan yang akan diambil”.⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian atas terhadap suatu kajian pada direktorat BPPK lebih cenderung menggunakan pendekatan intuisi atau berdasar pada pengalaman

⁷ *Ibid.*

dalam menentukan skala prioritas mengenai kebijakan yang akan diambil. Peneliti melihat bahwa pendekatan yang menggunakan intuisi sebagai panduan dalam menentukan suatu keputusan tidak akan selamanya dapat memberikan ukuran yang tepat dalam merumuskan suatu keputusan. Hal ini tentunya akan banyak pemborosan waktu dalam hal pencarian informasi dalam mendukung keputusan berdasarkan intuisi. Dengan demikian juga akan berpengaruh pada semakin meningkatnya anggaran yang diakibatkan semakin lamanya kajian terhadap suatu permasalahan.

b. User atau Sumber Daya Manusia

Dalam implementasinya pengembangan SIM yang terkomputerisasi dengan berbagai *tools* pendukung lainnya harus menyesuaikan dengan kemampuan dari para pelaksana dalam mendukung kegiatan manajemen. Komponen fisik yang paling vital adalah unsur sumber daya manusia sebagai kelompok dominan yang paling penting menentukan dalam operasi SIM. Sistem yang dirancang dengan sangat baik dan memakai peralatan yang canggih tidak akan menghasilkan output maksimal jika kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut tidak mampu mengimbangnya. Sebab tanpa adanya dukungan personil yang ahli, handal, dan terampil maka SIM yang ada pun tidak mungkin dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) yang menyatakan bahwa:

“Ketersedian SDM yang memadai dalam hal kuantitas dan kualitas tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Begitu pula dengan BPPK kami menyadari bahwa sebagai unit kajian dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan, tentunya harus didukung oleh SDM yang berkualitas profesional terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal penerapan SIM di direktorat BPPK ketersediaan SDM saya pikir sudah cukup, dalam arti tersedia jumlah yang cukup dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Saat ini penerapan dan pengembangan SIM dilakukan berdasarkan pada kekuatan yang kita punya. Artinya saat ini kita tidak memakai outsourcing lain dimana kita

*mengerjakan sendiri. Dalam membantu pengerjaan ini kami menggunakan bantuan Puskom sebagai penanggung jawab dalam hal jaringan dan penyediaan infrastruktur lainnya”.*⁸

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa penerapan dan pengembangan SIM di BPPK dilakukan berdasarkan pada kekuatan internal organisasi, artinya saat ini BPPK tidak memakai *outsourcing* lain dimana BPPK mengerjakan sendiri dengan menggunakan bantuan Puskom dalam hal aringan dan penyediaan infrastruktur lainnya. Berkaitan dengan penjelasan di atas maka peneliti melihat bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam mewujudkan operasi SIM yang efektif pada direktorat BPPK belum sepenuhnya mendukung, karena belum adanya dukungan personil yang memiliki latar belakang ketrampilan atau keahlian sebagai *programmer* maupun *system analysis*. Dengan demikian hampir sebagian besar komputer yang digunakan dalam kinerja operasional organisasi, selain masih dioperasikan secara manual juga belum sepenuhnya dapat mendukung terwujudnya fungsi pengelolaan data secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dalam penyediaan SDM yang ahli, handal, dan terampil tersebut, maka Departemen Luar Negeri khususnya direktorat BPPK dituntut untuk menyediakan dukungan personil secara memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yakni tercermin dari latar belakang keahlian personil yang sesuai dengan kebutuhan.

c. *Network*

Dalam rangka menyediakan informasi pada masing-masing unit organisasi sebagai satuan kerja fungsional, SIM harus disertai atas dasar desain subsistem yang sesuai dengan keperluan, sehingga masing-masing unit organisasi memiliki jaringan informasi yang memberikan fasilitas untuk saling berhubungan secara terus-menerus. Sehingga berbagai tindakan yang dilaksanakan dapat terselenggara secara terpadu. Jaringan informasi yang dirancang memungkinkan dapat mewujudkan setiap tahap kegiatan dalam proses perumusan keputusan terselenggara secara lebih efektif, efisien, dan terpadu, karena pada masing-

⁸ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) pada tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

masing unit organisasi sebagai satuan kerja fungsional berarti telah didukung oleh adanya suatu jaringan informasi yang memadai. Hal itu berarti sangat mendukung terhadap berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Wahyu sebagai berikut:

*“Fasilitas gedung yang biasa kita tempati saat ini sedang mengalami perbaikan, untuk itu sekarang kita sedang menempati gedung lain. mengenai jaringan yang ada di BPPK, pada waktu kita masih menempati gedung lama sudah terhubung online dengan jaringan yang ada di unit BPPK, akan tetapi saat ini kita belum terhubung lagi dengan jaringan LAN. Nantinya walaupun sudah menempati gedung lama yang sedang dibangun maka jaringan LAN tersebut akan dibangun kembali. Saat ini jaringan yang ada baru bersifat jaringan LAN, belum terhubung dengan jaringan yang lebih luas yakni jaringan WAN yang melingkupi seluruh unit di Deplu. Oleh karena walaupun nanti unit lainj ingin mengakses ke unit kita, BBPK harus menyertakan informasinya melalui hardcopy”.*⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa jaringan informasi pada direktorat BPPK sudah terhubung melalui jaringan LAN pada masing-masing unit *workstation/PC*. Meskipun demikian bukan berarti bahwa jaringan sistem yang ada terintegrasi dalam satu bagian. Informasi yang ada masih bersifat spesifik berdasar tugas dan fungsinya masing-masing unit di BPPK, dimana sistem *database* yang ada masih berfokus pada masing-masing unit. Sehingga pengembangan organisasi melalui *sharing knowledge* pada direktorat BPPK belum bisa dilakukan. Berkaitan dengan penjelasan di atas maka peneliti melihat bahwa dalam untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi jaringan informasi serta untuk menghindarkan kemungkinan timbulnya kerumitan yang dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya kegiatan yang tumpang tindih, maka perlu dilakukan pengelompokan sistem informasi yang satu sama lain saling berhubungan ke dalam subsistem. Atas dasar pengamatan yang dilakukan

⁹ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

terhadap jaringan informasi dalam penerapan SIM di direktorat BPPK, dapat diketahui bahwa pada dasarnya jaringan kerja informasi yang diterapkan belum dikelompokkan ke dalam suatu subsistem tertentu, sehingga masing-masing satuan kerja fungsional yang terlibat cenderung bekerja sendiri-sendiri dan mementingkan tugasnya masing-masing. Kenyataan ini menunjukkan belum adanya jaringan kerja informasi yang dapat mengintegrasikan berbagai tahap atau bagian kegiatan masing-masing satuan kerja fungsional yang saling berhubungan, untuk mewujudkan output kerja proses pengambilan keputusan secara sinergi dan terpadu. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya jaringan informasi yang dirancang secara tepat dan efektif, sangat memungkinkan dapat mewujudkan setiap tahap kegiatan guna menunjang peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan dapat terselenggara secara efektif, efisien, dan terpadu.

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi sebagai kesatuan elemen *hardware*, *software*, SDM, *network* yang terorganisasi belum dapat berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pengembangan SIM yang dilakukan oleh direktorat BPPK belum dilakukan secara menyeluruh sebagai elemen yang saling bergantung satu sama lain, yang baru berfokus pada pembangunan infrastruktur berupa *hardware* dan *network*. Kondisi ini kemudian berdampak pada belum maksimalnya dalam proses transformasi pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP), sebagai berikut :

”Salah satu kelemahan dalam pengembangan SIM pada unit kita adalah pengembangannya yang masih bersifat fisik, dalam arti hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, sedangkan dalam pengembangan software aplikasi dan pengembangan SDM masih belum dilakukan. Oleh karenanya tidak mengherankan pemanfaatan komputer dalam pengelolaan dan pengolahan informasi masih merupakan alat bantu yang berguna untuk mempercepat proses maupun agar pekerjaan menjadi lebih rapi, dimana penggunaannya masih terbatas untuk menggantikan fungsi mesin ketik. Padahal bagi pejabat eselon 1 dan 2 dibutuhkan jenis informasi yang

*benar-benar up to date, cepat, dan akurat yakni ketika kita butuhkan data tersebut, aksesnya dan ketersediaan datanya pun juga lengkap”.*¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa jenis informasi yang dibutuhkan oleh pejabat eselon 1 dan 2 adalah jenis informasi yang benar-benar *up to date*, cepat, dan akurat. Hal ini erat kaitannya dengan transformasi data melalui SIM elemen *hardware*, *software*, SDM, *network* terorganisasi dengan baik, artinya bahwa pengembangan SIM yang dilakukan pada suatu organisasi tidak hanya bersifat parsial pada salah satu elemen saja yang mengenyampingkan elemen lain, tetapi lebih bersifat menyeluruh sebagai elemen yang saling berkaitan. Pengembangan SIM yang terorganisir dengan baik antara elemen *hardware*, *software*, SDM, *network* akan memberikan kemampuan yang maksimal dalam transformasi data secepat mungkin ketika dibutuhkan yang dikarenakan kondisi global yang menuntut kita selalu siap menjawabnya, dimana pengembangan SIM harus ditunjang dengan adanya penyediaan infrastruktur dalam hal *hardware* dan *network* serta juga didukung oleh pengembangan SDM dan *software* aplikasi dalam melakukan proses input dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekretariat BPPK sebagai berikut :

”Dalam pengembangan SIM pada pada unit kita, BPPK mendapat jatah 200-300 juta setiap tahun dalam pengembangan software aplikasi pengelolaan informasi melalui SIM. Budget itupun belum termasuk dalam penyediaan infrastruktur yang sifatnya terpisah yang dapat diusulkan anggarannya. Idealnya pada unit kita sudah ada unit khusus yang mengelola informasi secara komputerisasi melalui SIM. Namun pengembangan yang dilakukan pada unit kita masih bersifat pengembangan fisik yang belum tertuju pada pengembangan software aplikasi dan pengembangan SDM. Untuk itu tidaklah mengherankan pemanfaatan komputer yang ada pada unit kita baru sebatas pemanfaatan komputer yang ada dalam pengelolaan dan pengolahan informasi masih merupakan alat bantu yang berguna untuk mempercepat proses maupun

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

*agar pekerjaan menjadi lebih rapi, dimana penggunaanya masih terbatas untuk menggantikan fungsi mesin ketik”.*¹¹

Berdasarkan pada pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pengembangan SIM yang dilakukan oleh BPPK belum sepenuhnya terorganisir dengan baik sehingga akan menghambat dalam proses transformasi data dalam memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Penerapan SIM atau pengelolaan dan pengolahan informasi di BPPK merupakan dari bagian subsistem dari sistem informasi manajemen yang ada di Departemen Luar Negeri. Namun sayangnya subsistem yang ada pada masing-masing unit di Departemen Luar Negeri mengurus bidang kerjanya masing-masing, yang belum terhubung dalam satu integrasi data manajemen sistem *database*, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

*“Kegiatan di BPPK belum terlihat adanya integrasi data dalam satu sistem. Bagian-bagian subsistem-subsistem yang ada masih mengurus bidang kerjanya masing-masing, yang belum terhubung dalam satu integrasi data manajemen sistem database. Kondisi sekarang unit di BPPK masih bersifat spesifik dimana pegawai hanya berfokus pada tugas dan fungsinya masing-masing”.*¹²

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Bagian Pusat Pada Organisasi Internasional sebagai berikut:

*“Sampai saat ini hubungan penerapan SIM di BPPK sebagai subsistem dari SIM Departemen Luar Negeri secara keseluruhan masih terpisah belum menjadi satu sistem kesatuan yang besar. Dalam kaitannya dengan peran dan tugas BPPK, Menlu mendapat masukan berupa hasil kajian yang telah dilakukan oleh BPPK. Namun pengintegrasian dalam satu sistem database belum bisa kita lakukan saat ini”.*¹³

¹¹ Wawancara dengan Kepala Sekretariat BPPK Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional (OI) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

Bila dilihat pada kedua pernyataan di atas peneliti melihat bahwa penerapan SIM di BPPK sebagai subsistem dari SIM Departemen Luar Negeri secara keseluruhan masih terpisah belum menjadi satu sistem kesatuan yang besar. Dimana masing-masing bagian atau unit di direktorat BPPK mempunyai sistem informasi sendiri dan belum terhubung dengan sistem jaringan yang *on-line*, sehingga tiap-tiap bagian atau unit jika memerlukan informasi yang dibutuhkan dari unit lain adalah dengan membuat *hardcopy*. Sehingga tentunya mengurangi kecepatan serta juga menyebabkan tumpang tindih antara tiap-tiap bagian atau unit tersebut. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kelambatan, ketidakakuratan, ketidaktepatan informasi yang dihasilkan, sehingga proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang memuaskan karena belum sepenuhnya didukung oleh informasi yang *up to date*. Sebagai satu sistem organisasi deplu secara keseluruhan, setidaknya BPPK merupakan subsistem yang saling berinteraksi dengan unit lain. Hal ini berarti keberadaan BPPK pada Departemen Luar Negeri tidak dapat berdiri sendiri, namun menjadi satu sistem yang terpadu, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP), sebagai berikut :

*”Sebagai badan yang melakukan tugas penelitian dan pengembangan kebijakan, BPPK memiliki peran yang strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi Menteri Luar Negeri. Ketika BPPK ditugaskan oleh Menlu mengkaji suatu masalah, maka peran BPPK sangat dibutuhkan sebagai unit perumusan kebijakan yang nantinya akan dijalankan oleh direktorat lain. Misalnya tentang global resesi yang sedang melanda dunia internasional, pengkajian terhadap masalah tersebut perlu mendapat dukungan berupa informasi dari unit terkait lain dan informasi dari kedutaan. Hal ini akan menjadi input dalam melakukan perumusan kebijakan yang nantinya akan direkomendasikan dan dijalankan oleh direktorat lain”.*¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan direktorat BPPK sebagai subsistem dari organisasi deplu secara keseluruhan erat kaitannya dengan keberadaan unit lain. Peran BPPK sebagai permusan rekomendasi kebijakan sangat membutuhkan kemampuan dalam memperoleh informasi yang *up to date*, cepat, dan relevan dalam mengkaji suatu isu aktual. Hal ini membuktikan bahwa data yang diperoleh sebagai input dalam mengkaji suatu isu aktual tidak cukup mengandalkan kebutuhan informasi dari BPPK saja, tetapi juga sangat berhubungan dengan unit atau instansi lain. Pengembangan SIM yang masih bersifat semi konvensional membuat hubungan informasi *database* belum terintegrasi dalam satu kesatuan yang terpadu. Kenyataan dilapangan masing-masing bagian atau unit di direktorat BPPK sebagai subsistem dari deplu secara keseluruhan mempunyai sistem informasi sendiri yang belum terhubung dalam satu *server* secara keseluruhan.

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa penerapan SIM ditinjau dari pendekatan sistem terhadap analisis kesiapan komponen fisik belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan mulai dari perangkat keras yang dimiliki oleh BPPK dalam pengelolaan dan pengolahan informasi yang dilakukan masih bersifat konvensional setengah komputerisasi, artinya keberadaan perangkat keras yang relatif baru belum dimanfaatkan secara maksimal guna menunjang produktivitas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Saat ini pemanfaatan komputer yang ada masih merupakan alat bantu yang berguna untuk mempercepat proses maupun agar pekerjaan menjadi lebih rapi, dimana penggunaannya masih terbatas untuk menggantikan fungsi mesin ketik. Begitu pula dengan komponen perangkat lunak yang belum dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan produktivitas organisasi BPPK khususnya dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini pengambilan keputusan yang dilakukan pada direktorat BPPK cenderung berdasarkan intuisi atau berdasar pada pengalaman dimana belum ada penggunaan perangkat lunak khusus dalam menunjang hal ini. Begitu pula dengan kesiapan SDM dalam mengoperasikan penerapan SIM ini belum dipersiapkan secara spesifik karena belum adanya dukungan personil yang memiliki latar belakang ketrampilan atau keahlian sebagai *programmer* maupun *system analysis.*, meskipun dalam hal kualitas dan

kuantitas cukup tersedia. Dalam hal jaringan, sampai saat ini direktorat BPPK meskipun sudah terhubung melalui jaringan LAN pada masing-masing unit *workstation/PC* bukan berarti bahwa jaringan sistem yang ada terintegrasi dalam satu bagian. Hal ini berarti bahwa penerapan SIM yang dilakukan pada direktorat BPPK berkaitan dengan analisis subsistem dari sistem yang ada belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan penerapan SIM di BPPK sebagai subsistem dari SIM Departemen Luar Negeri secara keseluruhan masih terpisah belum menjadi satu sistem kesatuan yang besar. Dimana masing-masing bagian atau unit di direktorat BPPK mempunyai sistem informasi sendiri dan belum terhubung dengan sistem jaringan yang *on-line*. Kondisi ini mengakibatkan unit di BPPK masih bersifat spesifik dimana pegawai hanya berfokus pada tugas dan fungsinya masing-masing. Informasi yang ada masih bersifat spesifik berdasar tugas dan fungsinya masing-masing unit di BPPK, dimana sistem *database* yang ada masih berfokus pada masing-masing unit. Sehingga masing-masing satuan kerja fungsional yang terlibat cenderung bekerja sendiri-sendiri dan mementingkan tugasnya masing-masing.

1.1.2 Management Oriented

Sistem informasi manajemen diartikan sebagai suatu metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat serta tepat waktu bagi pihak manajemen yang memungkinkan untuk melancarkan proses pengambilan keputusan serta memungkinkan perencanaan, pengendalian, dan operasional dilaksanakan secara efektif. Sejauh mana efektivitas penerapan SIM tergantung dari dua hal, yakni sejauh mana data tersebut akurat dan sejauh mana pemimpin menggunakan data-data tersebut untuk pengambilan keputusan. Efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK ditandai dengan adanya kecepatan dan ketepatan dalam menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Sebagai *top management* pejabat eselon 2 adalah orang kedua setelah kepala badan, dimana kebutuhan akan informasi yang *up to date* dan cepat menjadi suatu keharusan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui SIM, manajemen memiliki kerangka pemikiran yang dapat membantu mengatasi keruwetan dan membantu mengenal hakekat dari masalah-masalah yang kompleks. Hal ini memberikan

pengertian bahwa keberadaan SIM pada suatu organisasi menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

“SIM itu diibaratkan seperti halnya obat bagi orang yang sakit, biarpun pahit tetapi harus diminum. Dalam hal ini penerapan SIM pada suatu organisasi harus ada, biarpun disertai dengan anggaran yang besar dalam penyediaan infrastruktur tetapi harus ada yang mengelola jika kita peduli dengan eksistensi unit kita”.¹⁵

Hal ini senada dengan pendapat dari Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) sebagai berikut:

“Kalo meihat kondisi saat ini di BPPK, SIM itu sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataan bahwa kalau BPPK tidak tahu informasi apa yang sedang menjadi kajiannya, maka akan banyak ditemui duplication of work yakni kajian yang sama pada kasus yang sama. Hal ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya pemborosan, apalagi bila dilihat kenyataan bahwa untuk setiap kajian membutuhkan anggaran 200 juta rupiah. Kalau dengan adanya SIM kita akan punya database berupa rekaman hasil kajian yang telah kita lakukan. Karena informasi mengenai kajian yang telah dilakukan akan sangat berharga bagi pimpinan sebagai suatu referensi terhadap kajian lain”.¹⁶

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa BPPK memerlukan penerapan SIM yang efektif dalam memperoleh bahan masukan informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam merumuskan suatu kebijakan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, BPPK melakukan pengelolaan dan pengolahan informasi melalui penerapan SIM yang efektif. Kebutuhan manajemen yang terpenting adalah dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk melakukan tugas dan aktivitas sehari-hari dalam pengambilan keputusan diperlukan informasi yang dihasilkan oleh pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

Bentuk dan sifat dari sistem informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi sangat tergantung pada jenis kegiatan dan tipe keputusan yang dibuat oleh pengguna (*user*) sistem tersebut. Kebutuhan informasi pada setiap tingkatan manajerial dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan sangat mempengaruhi jenis data yang dibutuhkan untuk penggunaan pada setiap tingkatan manajerial. Hal ini karena setiap sifat kegiatan manajerial cenderung berbeda pada setiap tingkatan, dimana kebutuhan informasi yang berbeda pada setiap tingkatan akan dipenuhi oleh sumber-sumber yang berbeda pula. Dalam melakukan pemecahan masalah dan proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam memilih strategi atau tindakan yang berguna bagi tercapainya tujuan suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Wahyu sebagai berikut:

*“Kajian terhadap suatu masalah yang kami lakukan, pertama-tama dilakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah yang timbul. Dalam hal ini diidentifikasi ciri-ciri dari permasalahan didefinisikan masalahnya, dan dijelaskan constraints, scope, dan environment dari masalah tersebut. Kemudian dikembangkan beberapa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, alternatif-alternatif tersebut kemudian dievaluasi dan dipilih salah satu yang dianggap paling baik. Selanjutnya adalah implementasi dari alternatif yang telah dipilih, dan terakhir dilakukan monitoring atas situasi yang terjadi dan dilakukan modifikasi yang dianggap perlu terhadap problem solution tersebut. Dalam kaitannya dengan peran dan tugas BPPK, Menlu mendapat masukan berupa hasil kajian yang telah dilakukan oleh BPPK. Karena sekarang pimpinan dalam hal ini Menlu tidak mau repot berupa hasil kajian yang panjang, tetapi berupa hasil rekomendasi dari BPPK berupa perumusan kebijakan, yakni: bagaimana trend policy yang ada pada negara yang menjadi pusat kajian, bagaimana kondisi latar belakang negara yang menjadi pusat kajian, apa yang menjadi policy recommendation bagi pimpinan, dan apa yang menjadi policy option terhadap kajian tersebut”.*¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

Berdasarkan pernyataan Bapak Wahyu di atas, dapat diketahui bahwa dalam memecahkan permasalahan terhadap kajian yang dilakukan, BPPK menggunakan metode rasional dalam proses pengambilan keputusan yakni mulai dari identifikasi masalah, perolehan data, identifikasi alternatif pemecahan, evaluasi alternatif pemecahan, pemilihan alternatif terbaik, implementasi terhadap alternatif terbaik, monitoring atas situasi yang terjadi. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan adalah suatu upaya pengambilan keputusan untuk memilih strategi atau tindakan tertentu yakni memilih strategi atau tindakan yang berguna bagi tercapainya keputusan yang diambil.

Berkaitan dengan penjelasan di atas maka peneliti melihat bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM mempunyai peranan dalam memberikan laporan yang lebih akurat kepada *stakeholders* yang memang memerlukan, sehingga menjadi bahan masukan untuk pembuatan keputusan. Dalam hal ini tingkat efektivitas dari penerapan SIM pada Direktorat BPPK dilihat dari kecepatan dan ketepatan dalam menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat BPPK sebagai berikut :

”Sejauh mana tingkat efektivitas penerapan SIM tergantung dari banyak hal. Dalam proses pengambilan keputusan hal ini dapat dilihat, yakni sejauh mana penyediaan data itu akurat dan sejauh mana pimpinan mau menggunakan data-data tersebut untuk pengambilan keputusan. Kalau kedua hal ini dapat dipenuhi maka efektivitas keberadaan SIM di BPPK itu tinggi”.¹⁸

Berdasarkan pada pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan pejabat eselon 1 dan 2 dalam mengambil keputusan secepat mungkin dikarenakan kondisi global yang menuntut selalu siap untuk segera direspon. Untuk itu kebutuhan akan data yang cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan adalah suatu keharusan yang harus segera dipenuhi. Pengambilan keputusan pada Direktorat BPPK terdiri dari 2 jenis, yakni pengambilan

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Sekretariat BPPK Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

keputusan yang bersifat *short term* dan pengambilan keputusan yang bersifat *long term*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP), sebagai berikut :

*”Pengambilan keputusan setidaknya pada unit kita terdiri dari dua jenis, yakni pengambilan keputusan yang bersifat short term dan pengambilan keputusan yang bersifat long term. Pengambilan keputusan yang bersifat short term artinya adalah pengambilan keputusan yang pada saat ini terjadi. Misalkan kasus teroris yang terjadi pada salah satu kedutaan kita. Tentunya menghadapi krisis mendesak seperti ini sangat diperlukan informasi yang cepat, karena diperlukan keputusan yang cepat. Jika hal ini didukung oleh adanya data yang terintegrasi dimana bukan hanya pada unit kita tetapi juga pada unit terkait, hal ini akan sangat memudahkan dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Selain itu pengambilan keputusan yang bersifat short term adalah pengambilan keputusan untuk jangka waktu 2-3 bulan yang mengkaji suatu kebijakan apakah masih relevan untuk kedepannya, biasanya hal ini sumber datanya sudah ada hanya perlu melakukan perubahan saja. Pengambilan keputusan kedua yang bersifat long term biasanya menyangkut forecasting, dimana proses pengambilan keputusan dalam hal ini membutuhkan waktu yang panjang untuk jangka 20 tahun. Dengan adanya SIM melalui database akan membantu menyediakan kebutuhan data yang cepat, tepat, dan relevan”.*¹⁹

Berdasarkan pada pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan SIM yang efektif adalah kemampuan dalam kecepatan dan ketepatan dalam menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Kecepatan dan ketepatan data yang disediakan erat kaitannya dalam hal proses pengelolaan dan pengolahan data melalui SIM secara komputerisasi. Dalam prakteknya pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM pada direktorat BPPK masih sebatas semi konvensional, satu sisi masih dikumpulkan dalam satu folder-folder

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

surat sesuai dengan unit terkait dan disisi lain sebagian data tersebut sudah dimasukan ke dalam *database*. Pada kenyataannya proses pencarian data yang dilakukan lebih banyak mencari di folder yang ada ketimbang pencarian di dalam *database* secara komputerisasi. Dengan demikian hal ini berdampak pada perolehan dalam kecepatan dan ketepatan yang lebih lama dilakukan secara manual bila dibandingkan dengan pengelolaan informasi secara komputerisasi. Sehingga sering kali pejabat eselon 1 dan 2 kurang mendapat data yang komprehensif melalui *database* informasi, yang mengakibatkan terjadinya kelambatan dalam merespon permasalahan isu aktual.

Selain itu penerapan terbaik dari SIM adalah fungsi manajerial sebagai *controlling*, yakni dalam hal mengawasi dan mengendalikan operasi pelaksanaan program kegiatan. Salah satu komponen yang juga tidak kalah penting dalam penerapan SIM yang efektif, yakni terhadap fungsi keluaran informasi dalam memenuhi kebutuhan pemakai. Keluaran informasi dapat berupa laporan yang dirancang untuk memerlukan analisis lebih lanjut dalam memperoleh suatu pemecahan yang memuaskan. Sesuai dengan peran dan fungsinya BPPK yakni melakukan penelitian terhadap suatu kajian output yang dihasilkan oleh BPPK yang paling penting adalah suatu rumusan kajian penelitian. Rumusan kebijakan ini akan disampaikan kepada pimpinan, dimana bila mendapatkan persetujuan dari pimpinan maka rumusan ini akan menjadi suatu kebijakan. Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa penerapan SIM dalam pengelolaan dan pengolahan informasi sangat membantu organisasi khususnya BPPK dalam melakukan kajian penelitian dalam perolehan informasi yang akurat. Sehingga tidak akan ditemui lagi *duplication of work* yakni melakukan kajian yang sama pada kasus yang sama, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas output hasil kajian berupa rumusan kajian penelitian *policy review* dan *policy development* sebagai rekomendasi kepada pimpinan yang dalam hal ini adalah Menteri Luar Negeri.

Dengan demikian, kaitan antara pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM sangat mempengaruhi kebutuhan manajemen terutama dalam pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan hal ini, penerapan SIM pada direktorat BPPK dinilai belum berjalan efektif dalam menyediakan informasi yang cepat dan akurat melalui sistem *database* bagi pihak manajemen yang

memungkinkan untuk melancarkan proses pengambilan keputusan serta memungkinkan perencanaan, pengendalian, dan operasional dilaksanakan secara efektif. Hal ini dikarenakan Informasi yang diorganisir dan dipelihara masih bersifat semi konvensional secara manual yang ditempatkan dalam masing-masing folder surat-surat sesuai dengan fokus kerja masing-masing unit, sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya kelambatan dalam merespon permasalahan isu aktual dalam memenuhi kecepatan dan ketepatan data yang dibutuhkan.

1.1.3 Needs Based

Informasi yang baik akan membantu organisasi mengantisipasi lingkungannya yang meliputi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kebutuhan informasi suatu organisasi sangat berhubungan dengan aktivitas organisasi pada setiap tingkat dan hirarki manajemen. Efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK ditandai dalam menyediakan kebutuhan data yang lengkap dan akurat bagi masing-masing unit BPPK, dengan adanya kebutuhan informasi tersebut merupakan alasan mengapa SIM dalam menunjang efektifitas perlu di desain. Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Bagian Pusat Kajian Kebijakan Pada Organisasi Internasional sebagai berikut:

“Pengelolaan dan pengolahan informasi pada unit kita, cenderung masih bersifat spesifik berdasarkan pada tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi unit pusat kajian kebijakan pada organisasi internasional informasi yang dibutuhkan berupa isu-isu aktual kajian mengenai isu perundingan internasional. Informasinya pun akan berbeda pada masing-masing jabatan struktural pada unit kita. Misalnya saja untuk informasi-informasi dengan kategori biasa maka akan cenderung cepat menyebar dari level pimpinan kepala badan ke bawah, namun kalo sifat informasinya dengan kategori rahasia maka hanya mentok untuk level eselon I dan eselon II.”²⁰

Pernyataan Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional di atas mengindikasikan bahwa analisis kajian berdasarkan informasi yang diperoleh

²⁰ Wawancara dengan Kepala Bagian Pusat Kajian pada Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

disesuaikan dengan jabatan struktural organisasi, hal ini tentunya sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa Kebutuhan informasi pada setiap tingkatan manajerial dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan sangat mempengaruhi jenis data yang dibutuhkan untuk penggunaan pada setiap tingkatan manajerial. Kebutuhan informasi dilihat dari tingkatan manajemen dalam organisasi dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu: manajemen puncak dengan jenis keputusan manjerial dalam *strategic planning*, manajemen menengah dengan jenis keputusan manajerial dalam *management control*, dan manajemen bawah dengan jenis keputusan manajerial dalam *operasional control*. Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi tersebut berdasar pada jabatan struktural, hal ini dikarenakan setiap jabatan struktural memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.

Dalam mewujudkan visi Departemen Luar Negeri sampai dengan tahun 2009, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri yang kredibel dalam mendukung diplomasi total. Untuk mendukung terwujudnya visi Departemen Luar Negeri secara umum dan visi BPPK secara khusus, maka BPPK mengemban misi yaitu Mengoptimalkan peran strategis institusi sebagai unit pengkajian dan pengembangan kebijakan yang berkualitas, Meningkatkan cakupan dan substansi bahasan/kajian sehingga menghasilkan kajian kebijakan luar negeri yang relevan dengan dinamika perkembangan domestik dan internasional, Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kepastakaan dan dokumentasi untuk kepentingan pengkajian.²¹

Adanya arahan rencana strategi yang berhubungan dengan visi, misi maupun keadaan lingkungan eksternal organisasi, kebutuhan pengelolaan dan pengolah informasi melalui SIM menjadi kunci dalam mengemban terwujudnya visi dan misi BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan yang kredibel dalam mendukung diplomasi total. Melalui dukungan informasi yang relevan dan akurat terkait juga dengan fungsi dari Departemen Luar Negeri sebagai organisasi publik, dapat memberikan bahan masukan dalam proses

²¹ Departemen Luar Negeri, *Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Tahun 2005-2009*

perumusan kebijakan melalui *policy review* dan *policy development*, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

*“Kebutuhan informasi yang dikelola dengan baik, bagi kami akan memberikan kemudahan dalam melakukan pencarian informasi yang up to date sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit. Dalam hal ini ada tiga manfaat pengelolaan dan pengolahan informasi yang efektif yakni; informasi database tentang narasumber dalam pembahasan terhadap suatu kajian, informasi database tentang country profile, informasi database tentang kumpulan hasil kajian yang telah dilakukan”.*²²

Pernyataan Bapak Wahyu di atas mengindikasikan bahwa melakukan suatu kajian dalam menghasilkan *policy review* dan *policy development* diperlukan *database* informasi yang terpusat mencakup informasi *database* tentang narasumber, informasi *database* tentang *country profile*, informasi *database* tentang hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui informasi *database* ini kita akan mengetahui *database* tentang narasumber siapa yang mempunyai kapabilitas di bidang apa, *database country profile* tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara yang menjadi pusat kajian BPPK, dan *database* kumpulan hasil kajian sebelumnya agar jangan sampai BPPK mengulang kajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Menurut peneliti penerapan SIM pada suatu organisasi adalah mutlak diperlukan apalagi pada direktorat BPPK. Hal ini tentunya menyangkut perolehan informasi yang relevan dalam menunjang kajian penelitian yang dilakukan oleh BPPK. Pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM boleh jadi akan memberikan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat karena karakter utama SIM adalah bersifat integratif yaitu merangkai pandangan-pandangan yang lengkap mengenai subsistem yang berkaitan. Dalam kaitannya dengan hal ini penerapan SIM pada direktorat BPPK masih bersifat spesifik yaitu penggunaan data unik yang hanya digunakan pada unit tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP), sebagai berikut :

²² Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

*”Pengelolaan dan pengolahan data pada deplu masih bersifat parsial, dimana masing-masing unit memiliki data unik sesuai dengan kebutuhan unit tersebut. Begitupun data yang ada di unit BPPK yang terbatas dari BPPK saja. Hal ini kemudian berdampak pada kurang bisanya mengakomodir kepentingan unit yang lain. Seringkali bagi unit kita mendapat kesulitan dalam mendapatkan data yang komprehensif sehingga menyebabkan kelambatan dalam menganalisis terhadap suatu kajian yang kita lakukan. Misalkan kita berbicara tentang bidang militer sampai sejauh mana perkembangannya. Dalam melakukan kajian ini tentunya kita memerlukan sejumlah data yang idealnya terintegrasi dengan unit dan instansi terkait. Integrasi dalam arti memberi kemudahan dalam hal akses pencarian data. Jadi tidak perlu lagi melakukan teknis secara manual mencari data berkas yang berisi folder-folder fisik mengenai data yang kita butuhkan”.*²³

Dengan melihat kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi melalui penerapan SIM berdasar pada analisis kebutuhan belum berjalan efektif. Penggunaan data yang masih bersifat spesifik/unik terbatas dari unit BPPK saja menjadi alasan mengapa penerapan SIM pada direktorat BPPK belum berjalan efektif karena belum bisa mengakomodir kepentingan unit lainnya. Untuk itu kebutuhan pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM menjadi kunci dalam mengemban terwujudnya visi dan misi BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan yang kredibel dalam mendukung diplomasi total. Melalui dukungan informasi yang relevan dan akurat terkait juga dengan fungsi dari Departemen Luar Negeri sebagai organisasi publik, dapat memberikan bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan melalui *policy review* dan *policy development*. Sehingga bisa dilahirkan suatu hasil kajian yang berkualitas sebagai rekomendasi bagi kebijakan luar negeri pada level pimpinan.

²³ Wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

1.1.4 *Exeption Based*

Salah satu faktor yang belum dapat menjawab kerasnya tantangan saat ini adalah kurangnya peranan SIM yang dapat menunjang kegiatan suatu organisasi dalam memberikan alternatif terbaik dalam proses pembuatan keputusan. SIM menunjang pengambilan keputusan pada semua tingkat organisasi dalam kegiatan manajerial, dalam kondisi lingkungan permasalahan terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Permasalahan tidak terstruktur merupakan salah satu pengecualian terhadap kondisi normal dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan dan pengolahan informasi secara manual akan sangat menyulitkan dalam mencari informasi yang relevan dengan cepat. Efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK ditandai dari kemampuan SIM dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak normal.

Pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM, pada kondisi pengecualian terhadap permasalahan tidak terstruktur dalam arti situasi yang tidak normal akan membantu secara cepat dan sistematis dalam melakukan pencarian informasi yang relavan sebagai alternatif dalam proses pengambilan keputusan. Informasi diorganisir dan dipelihara sedemikian rupa sehingga setiap bagian atau unit organisasi dapat memperoleh informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Pimpinan memecahkan masalah berdasarkan pada informasi yang diterima dalam hubungan dengan strategi, prosedur dan peraturan yang telah dikembangkan sebelumnya. Tergantung pada tingkatan dalam organisasi dan atau jenis keputusan (*programmed* dan *nonprogramed*). Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) yang menyatakan bahwa:

“Proses pengambilan keputusan dalam melakukan suatu kajian di BPPK sangat dipengaruhi dalam perolehan informasi yang akurat. Dalam memecahkan masalah terhadap suatu kajian yang kami lakukan, berdasarkan pada informasi yang kami terima tergantung pada tingkatan manjerial dan atau jenis keputusan (programmed dan nonprogramed) yang akan diambil. Jika masalahnya biasa dan rutin pembuat keputusan dapat mengatasi dengan cepat, terutama jika terdapat peraturan atau prosedur yang berkenaan dengan situasi

*masalah tersebut. Jika masalahnya lebih kompleks dan lebih bersifat nonprogramed, pembuat keputusan mungkin memerlukan input (masukan) tambahan dan mungkin pula memerlukan konsultasi dengan bawahan atau dengan atasan/pucuk pimpinan”.*²⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Wahyu bahwa pemecahan masalah berdasarkan pada informasi yang betul-betul relevan sangat dibutuhkan dalam dalam proses pengambilan keputusan, sebagai berikut :

*“Dalam memenuhi informasi sebagai input (masukan) terhadap kajian yang kita lakukan, harus dilihat berdasarkan pada analisis kebutuhan informasi dan analisis data. Analisis kebutuhan informasi merupakan suatu pendekatan pembuat keputusan dari atas ke bawah, yang menelusuri kebutuhan informasi berdasarkan tujuan dari keputusan yang akan dibuat, yaitu; mengidentifikasi tujuan keputusan, mengidentifikasi atau merumuskan suatu model keputusan atau prosedur pembuat keputusan, mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk model keputusan atau pembuat keputusan. Sedangkan analisis data merupakan suatu pendekatan pembuatan keputusan dari bawah ke atas yang menelusuri kebutuhan informasi berdasarkan data yang ada atau secara potensial dapat dipakai dengan mengumpulkan semua dokumen, laporan dan file yang dapat dipakai dalam mengidentifikasi data yang dikumpulkan; dengan jalan wawancara menyelidiki informasi yang ada dalam organisasi/instansi lain sehingga dapat mengidentifikasi data yang belum dikumpulkan atau diolah”.*²⁵

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, peneliti melihat bahwa informasi yang relevan adalah syarat mutlak dalam pengambilan keputusan kearah pencapaian tujuan. Pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM berperan dalam memonitor dan mengumpulkan informasi yang masuk serta mengidentifikasikan informasi terhadap tujuan organisasi, terhadap permasalahan

²⁴ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

²⁵ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

yang tidak terstruktur dengan situasi yang tidak normal. Sehingga hanya informasi yang betul-betul relevan yang akan dihasilkan dari output penerapan SIM dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kondisi normal pembuat keputusan dapat mengatasi dengan cepat, terutama jika terdapat peraturan atau prosedur yang berkenaan dengan situasi masalah tersebut. Akan tetapi jika masalahnya lebih kompleks atau lebih bersifat tidak terstruktur, pembuat keputusan mungkin memerlukan input (masukan) tambahan dari unit atau instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan kekurangan data pada unit tersebut dan mungkin pula memerlukan konsultasi dengan bawahan atau dengan atasan/pucuk pimpinan. Mengenai hal ini Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP), menyatakan bahwa :

"Pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM seperti ibaratnya bandul yang menjaga keseimbangan pada masing-masing sisi. Pengelolaan informasi melalui SIM akan mengorganisasikan informasi secara sistematis guna memenuhi kebutuhan informasi pada kondisi normal ataupun kondisi pengecualian. Misalnya saja kasus yang belum lama terjadi, beberapa bulan kemarin kita mengadakan lokakarya kebudayaan Indonesia di negara Ukraina. Pada waktu itu kita menampilkan kebudayaan debus dari daerah Banten. Disaat yang bersamaan ketua delegasi dari negara tersebut menanyakan apa yang dimaksud dengan debus? Bisakah dijelaskan bagaimana kebudayaan ini bisa berkembang? Peranan SIM pada kondisi pengecualian terhadap masalah yang tidak terstruktur akan sangat membantu menjawab pertanyaan yang diajukan, karena saat itulah moment yang tepat untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia pada masyarakat dunia".²⁶

Berdasarkan pada pernyataan di atas dapat diketahui bahwa peranan SIM pada suatu organisasi akan sangat membantu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam menghadapi permasalahan yang tidak terstruktur. Sehingga keputusan yang akan diambil terhadap permasalahan tersebut dapat

²⁶ Wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip

direspons segera mungkin. Namun sayangnya pengelolaan dan pengolahan informasi yang masih bersifat semi konvensional membuat para pengambil keputusan dalam hal ini pejabat eselon 1 dan 2 mendapat kesulitan dalam menjawab permasalahan yang tidak terstruktur. Hal ini berarti bahwa penerapan SIM pada Direktorat BPPK masih belum berjalan efektif, dikarenakan belum mampu secara cepat merespon permasalahan dalam kondisi yang tidak normal. Masalah-masalah dalam merumuskan kebijakan menyangkut dua bahasan utama yakni mengenai informasi kajian mengenai negara dan isu aktual. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) sebagai berikut:

*“Dalam melakukan kajiannya jenis informasi yang dikelola dan diolah di BPPK disesuaikan dengan tugas dan fungsi kita. Seperti isu-isu aktual dan isu-isu strategis misalnya, kasus perkembangan global warming. Sebenarnya dalam melihat kasus-kasus yang terjadi, dapat dianalisis berdasar dua aspek yakni; aspek negara dan aspek isu aktual yang sedang terjadi”.*²⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Wahyu mengenai jenis informasi yang dikelola sebagai berikut:

“.....begini ya mas, di BPPK kita mempunyai tiga unit khusus kajian untuk tiga kawasan, yakni kajian untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kajian untuk kawasan Amerika dan Eropa, dan Kajian untuk kawasan pada Organisasi Internasional, serta satu unit yang mengurus sekretariat. Jadi kalo dilihat dari susunan struktur ini jelas akan terlihat bahwa masing-masing unit memiliki jenis yang berbeda disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi unit Aspasaf sendiri jenis informasi yang dikelola adalah informasi seputar permasalahan isu-isu aktual yang terjadi pada kawasan Aspasaf yang memiliki peran strategis bagi kepentingan bangsa Indonesia, misalnya dalam hal ini mengenai isu perbatasan dengan negara lain yang rawan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melihat ini kami nantinya

²⁷ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

melakukan rekomendasi perumusan kebijakan berupa policy review dan policy development dengan melakukan kajian terhadap isu terkait melalui pengelolaan dan pengolahan informasi melalui peerapan SIM yang efektif.²⁸

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, peneliti melihat bahwa perolehan informasi yang cepat, tepat, dan akurat akan menentukan kualitas dari hasil kajian yang dilakukan dalam menghasilkan *policy review* dan *policy development* perumusan kebijakan bagi Menlu. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan yang diharapkan dalam penerapan SIM yang efektif ialah mendukung ketersediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan hal ini analisis aspek negara merupakan kajian terhadap dinamisasi permasalahan ekopolsusbud yang didapat dari laporan mingguan perwakilan KBRI diluar. Sementara analisis aspek isu aktual merupakan isu publik yang sedang hangat diperbincangkan dunia internasional. Berkaitan dengan penjelasan di atas maka peneliti melihat bahwa penerapan SIM yang efektif akan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang dihasilkan, yang ditandai dengan peningkatan produktivitas bagi unit di BPPK dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan bahwa mekanisme perolehan informasi yang didukung penerapan SIM akan didapat dengan cepat dan *up to date* sesuai dengan kajian terhadap suatu isu bagi rekomendasi perumusan suatu kebijakan. Melalui penerapan SIM informasi yang masuk akan disaring dan dievaluasi sehingga hanya informasi yang betul-betul relevan akan diberikan kepada pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan SIM yang efektif akan memadatkan informasi, sehingga informasi yang relevan dapat diserap dengan cepat yang dapat meningkatkan kualitas dalam perumusan pengambilan keputusan.

²⁸ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

1.1.5 *Future Oriented and Long-Term Planning*

Penerapan SIM dalam menjawab tantangan masa depan dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan berinovasi dengan cara menyediakan kandungan-kandungan informasi yang tertata rapi dan mudah diakses, dicari, dan ditelusuri oleh semua pihak yang membutuhkan. direktorat BPPK mengembangkan SIM dalam usaha membantu pengambilan keputusan kearah pencapaian tujuan. Efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK ditandai pada pengembangan SIM yang berfokus pada kemampuan untuk memacu inovasi, meningkatkan produktivitas, dan membangun sinergi semua elemen organisasi. Penerapan SIM pada direktorat BPPK Departemen Luar Negeri dalam pengelolaan dan pengolahan informasi secara cepat dan akurat akan mendukung kinerja peningkatan efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah. Rancangan yang dibuat memperlihatkan semangat mewujudkan peningkatan pengguna yang berbasis pengetahuan (*knowledge worker*), berorientasi pada manusia dan kepentingan umum dengan menekankan pada aspek kualitas fungsional, kualitas teknis, serta kualitas layanan. Kelak, apabila penerapan SIM pada direktorat BPPK berbasis elektronik menjadi kenyataan, boleh jadi ia dapat mengurangi rantai proses kerja dalam struktur organisasi serta sebagai wadah dalam menampung gagasan dan solusi yang bersifat *bottom up*.

Pengembangan SIM yang di dukung oleh peralatan komputer akan diyakini akan memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi sehingga dalam proses pengambilan suatu keputusan yang bersifat strategis, fungsional, maupun operasional dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Pengembangan suatu SIM merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, dimana dibutuhkan individu-individu dengan kemampuan professional yang tinggi untuk menangani ini. Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa penerapan dan pengembangan SIM di direktorat BPPK terus mengalami kemajuan dalam bidang teknologi dari waktu ke waktu, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

“Kalo dilihat penerapan SIM yang ada dikita saat ini masih konvensional setengah komputerisasi. Kedepan kita akan melakukan komputerisasi dengan sistem jaringan intranet yang terhubung dalam jaringan seluruh

*Deplu, dimana sumber informasi nantinya akan terintegrasi dalam satu sumber. Kondisi sekarang unit di BPPK masih bersifat spesifik dimana pegawai hanya berfokus pada tugas dan fungsinya masing-masing”.*²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti melihat bahwa penerapan dan pengembangan SIM di BPPK dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Pengelolaan dan pengolahan informasi dengan menggunakan sistem manual dalam jangka panjang akan digantikan dengan penggunaan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan BPPK. Saat ini memang masih terlihat penerapan SIM yang ada di BPPK masih konvensional setengah komputerisasi, artinya keberadaan perangkat keras yang relatif baru belum dimanfaatkan secara maksimal guna menunjang produktivitas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Saat ini pemanfaatan komputer yang ada masih merupakan alat bantu yang berguna untuk mempercepat proses maupun agar pekerjaan menjadi lebih rapi, dimana penggunaannya masih terbatas untuk menggantikan fungsi mesin ketik, sedangkan ketersediaan program-program aplikasi perangkat lunak belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Padahal kenyataan membuktikan bahwa kegiatan organisasi akan lebih cepat dan sistematis serta dapat memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi, dimana nilai investasi yang ditanamkan relatif menjadi lebih murah bila disertai penggunaan *software* pendukung. Menanggapi hal ini ke depan penerapan dan pengembangan SIM yang dilakukan di BPPK akan menggunakan komputerisasi dengan sistem jaringan intranet yang terhubung dalam jaringan seluruh Deplu, dimana sumber informasi nantinya akan terintegrasi dalam satu sumber.

Pengembangan infrastruktur didasarkan pada sasaran pembangunan teknologi informasi yang berfokus pada kemampuan untuk memacu inovasi, meningkatkan produktivitas, dan membangun sinergi semua elemen organisasi yang terkait bangsa. Dalam upaya pencapaian ketiga tujuan tersebut, ketersediaan infrastruktur yang handal dan berkualitas tinggi dengan jangkauan yang luas akan dapat mendukung terciptanya sinergi antar seluruh *stakeholders*. sebagaimana

²⁹ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penerapan SIM di direktorat BPPK ketersediaan SDM saya pikir sudah cukup, dalam arti tersedia jumlah yang cukup dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Saat ini penerapan dan pengembangan SIM dilakukan berdasarkan pada kekuatan yang kita punya. Artinya saat ini kita tidak memakai outsourcing lain dimana kita mengerjakan sendiri. Dalam membantu pengerjaan ini kami menggunakan bantuan Puskom sebagai penanggung jawab dalam hal jaringan dan penyediaan infrastruktur lainnya”.³⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam penerapan dan pengembangan SIM di BPPK berdasarkan pada kebutuhan dan kekuatan internal organisasi. Hal ini tercermin pada pernyataan di atas yang menyebutkan bahwa saat ini penerapan dan pengembangan SIM dilakukan di BPPK berdasarkan pada kekuatan internal organisasi dengan melihat potensi atau kebutuhan bagi direktorat BPPK. Dalam prakteknya pengembangan SIM pada direktorat BPPK belum menjadi program prioritas utama sebagai pendukung perumusan kebijakan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP), sebagai berikut :

”Belum lama ini kita melakukan perbandingan dengan lembaga kajian seperti halnya BPPK departemen luar negeri pada negara lain, yakni sebagai bentuk kerjasama untuk saling bertukar pikiran dengan lembaga sejenis BPPK kementerian luar negeri pada negara lain. Dengan melakukan studi banding dari negara yang bersangkutan, ternyata lembaga sejenis BPPK pada kementerian negara lain lebih mengutamakan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengolahan informasi sebagai dukungan utama dalam mereka dalam merumuskan kebijakan yang sudah terintegrasi dengan dukungan personel lulusan

³⁰ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) pada tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

*yang capable dibidang IT. Dalam melihat hal ini deplu merespon untuk berencana melakukan restrukturisasi dengan penarikan personel lulusan yang capable dibidang IT. Karena selama ini kita hanya merekrut lulusan D3 untu sistem komunikasi. Nantinya suatu saat lulusan sarjana dalam bidang IT akan menggantikan perekrutan dari lulusan D3 tersebut yang kemudian ditempatkan sebanyak 3-4 orang pada setiap unit kerja untuk mengelola SIM ini”.*³¹

Hal senada mengenai pengembangan SIM pada direktorat BPPK juga disampaikan oleh Kepala Sekretariat BPPK, sebagai berikut :

*”pengembangan SIM berorientasi jangka panjang yang dilakukan pada unit kita ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pengolahan informasi. Harapan yang ingin dicapai pengembangan SIM dapat menunjang efektivitas organisasi BPPK secara keseluruhan, yakni meningkatkan kualitas hasil kajian yang kita lakukan sebagai rekomendasi bagi menlu dalam merumuskan suatu kebijakan. Contoh yang paling nyata adalah untuk kedepannya pengembagan SIM yang dilakukan perlunya ada dukungan dari infrastruktur yang memadai berupa tersedianya server yang mampu mengintegrasikan data serta didukung pula oleh SDM yang kompeten dalam bidang IT melakukan pengolahan data”.*³²

Guna menunjang pembangunan dan pengembangan SIM yang dilakukan, dilakukan dengan menggunakan bantuan Puskom sebagai penanggung jawab dalam hal jaringan dan penyediaan infrastruktur lainnya. Karena demikian pentingnya peranan infrastruktur, diperlukan strategi khusus dalam perencanaan dan pengembangannya, khususnya dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi secara keseluruhan. Pada akhirnya perlu ditekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan sendiri. Pada saat yang bersamaan, perlu dilakukan pula pengembangan aplikasi dan isi yang berkaitan dengan teknologi informasi, dibarengi dengan penyiapan

³¹ Wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP), pada tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

³² Wawancara dengan Kepala Sekretariat BPPK, pada tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

sumber daya manusia sebagai perencana, pengembang, pengoperasi, dan pengguna teknologi. Seluruh aktivitas penelitian dan pengembangan tersebut perlu terintegrasi untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan teknologi informasi.

Dari uraian sebelumnya telah terlihat penerapan SIM melalui teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting bagi peningkatan daya saing dan kemandirian BPPK melalui tugas penelitian dan pengembangan kebijakan berupa *policy planning* dan *policy review* dalam merangsang inovasi, meningkatkan produktivitas dan membentuk sinergi antar semua elemen organisasi yang terkait. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional sebagai berikut:

*”Penerapan SIM dalam menjawab tantangan masa depan adalah suatu keharusan bagi unit kita, sebagai satu-satunya unit yang melakukan kajian dalam hal pengkajian dan pengembangan kebijakan harus didukung dengan informasi yang up to date, akurat dan relevan. Misalnya saja dalam kajian Asean Maritim Forum, dalam hal ini akan dilihat siapa yang berkepentingan, informasi apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang harus kita handle, tentunya akan sangat mudah bila ditunjang dengan penerapan SIM melalui sistem database. Sehingga dengan cepat kita akan memperoleh data yang relevan dalam melakukan kajian ini”.*³³

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Wahyu mengenai peranan SIM dalam tantangan masa depan sebagai berikut:

”Penerapan SIM dalam menjawab tantangan masa depan pada direktorat kita dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan berinovasi, meningkatkan produktivitas dan membentuk sinergi antar semua elemen organisasi yang terkait. Pencapaian tujuan ini ditunjukkan bahwa untuk merangsang kemampuan berinovasi, diperlukan kandungan informasi yang tertata rapi dan mudah diakses; untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan pendukung sistem aplikasi teknologi informasi yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan dan; untuk membentuk sinergi,

³³ Wawancara dengan Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional (OI) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

*diperlukan infrastruktur informasi yang menyediakan hubungan langsung antar stakeholder”.*³⁴

Berdasarkan pada kedua pernyataan di atas peneliti melihat bahwa orientasi tujuan penerapan SIM terhadap tantangan masa depan pada direktorat BPPK adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan berinovasi, meningkatkan produktivitas dan membentuk sinergi antar semua elemen organisasi yang terkait. Dalam pencapaian tujuan harus didukung dengan kandungan informasi yang tertata rapi dan mudah diakses, yakni melalui manajemen *database* yang terintegrasi pada setiap masing unit di BPPK. Hal ini dikarenakan hanya dengan sistem informasi yang terintegrasi akan di dapat informasi yang dipakai mengandung arti yang sama dan penggunaan yang sama disemua pengguna data setiap saat. Selain itu juga akan memberikan kemudahan dalam mengakses data yang diperlukan bagi setiap masing-masing pengguna (*user*). Disamping itu dalam meningkatkan produktivitas organisasi BPPK, juga perlu ditunjang pendukung sistem aplikasi teknologi informasi yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan agar penyelesaian atas terhadap suatu kajian pada direktorat BPPK tidak lagi menggunakan pendekatan intuisi atau berdasar pada pengalaman dalam menentukan skala prioritas mengenai kebijakan yang akan diambil. Sehingga akan dapat menghasilkan *policy review* dan *policy development* yang berkualitas sebagai perumusan kebijakan bagi Menlu. Dan untuk tujuan membentuk sinergi antar semua elemen organisasi yang terkait, diperlukan infrastruktur informasi yang menyediakan hubungan langsung antar *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan dalam pengembangan organisasi melalui *sharing knowledge*, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan selain juga ditujukan untuk menyediakan hubungan langsung antar *stakeholder*.

Dengan melihat kenyataan di atas pengembangan SIM yang dilakukan harus berorientasi masa depan dalam rangka meningkatkan kemampuan berinovasi, meningkatkan produktivitas dan membentuk sinergi antar semua elemen organisasi yang terkait. Berdasarkan hal tersebut penerapan SIM yang dilakukan pada direktorat BPPK berdasar analisis yang berorientasi masa depan

³⁴ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, Pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip

sudah berjalan efektif. Hal ini berdasarkan pada pengembangan SIM yang dilakukan pada direktorat BPPK guna meningkatkan kemampuan berinovasi, diperlukan kandungan informasi yang tertata rapi dan mudah diakses; untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan pendukung sistem aplikasi teknologi informasi yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan dan; untuk membentuk sinergi, diperlukan infrastruktur informasi yang menyediakan hubungan langsung antar *stakeholder*. Dengan melihat kenyataan di atas penerapan SIM yang dilakukan pada direktorat BPPK berkaitan dengan analisis orientasi jangka panjang sudah berjalan cukup efektif, dimana hal ini ditandai pada pengembangan SIM yang berfokus pada kemampuan untuk memacu inovasi, meningkatkan produktivitas, dan membangun sinergi semua elemen organisasi. Pembangunan infrastruktur yang terus digalakan, baik dalam hal jaringan dan perangkat keras lainnya ialah dalam rangka mendukung penerapan SIM. Sehingga harapan yang ingin dicapai adalah dalam rangka mewujudkan sistem informasi yang terpadu dalam integrasi sistem *database*.

1.1.6 *Integrated and Central Database*

Karakter utama SIM adalah bersifat integratif yaitu menyatupadukan semua unsur dan bagian yang berkaitan atau dapat juga dikatakan sebagai merangkai pandangan-pandangan yang lengkap mengenai subsistem yang berkaitan. Dalam hal ini SIM dapat dipandang sebagai gabungan sistem-sistem informasi, suatu sistem organisasi. SIM terdiri dari subsistem-subsistem yang pada akhirnya membentuk *unified system*, dimana setiap subsistem ini berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan. Subsistem-subsistem yang ada diintegrasikan, sehingga aktivitas dari setiap subsistem berkaitan dengan subsistem lainnya. Efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK ditandai dengan penggunaan data yang telah dibakukan dalam suatu kesatuan konsep. Integrasi data merupakan struktur data yang telah dibakukan ke seluruh pengguna suatu data, hingga tercipta suatu kesatuan konsep. Penggunaan data yang terintegrasikan menjamin suatu data yang dipakai mengandung arti yang sama dan penggunaan yang sama disemua pengguna data setiap saat dan tetap konsisten, jika diaplikasikan untuk setiap sistem yang berbeda. Mengenai hal ini dengan adanya

integrasi data akan memberikan keuntungan dalam hal penyajian data yang terhubung antara masing-masing subsistem. Hal ini senada dengan pendapat Kepala Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional sebagai berikut:

*“Jika semakin tingginya tingkat ketergantungan antar unit yang terkait dan kecilnya tingkat perbedaan perspektif antar pengguna, penggunaan data yang terintegrasi memberikan keuntungan dalam meningkatkan kelancaran komunikasi arus informasi manajerial disemua pengguna. Tanpa adanya integrasi biaya pemrosesan akan semakin meningkat dan meningkatkan kesalahan dalam penyampaian informasi antar pengguna, yang akhirnya akan menyebabkan kelambatan komunikasi antar unit, fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan informasi yang unik padamasing-masing unit, mengoptimalkan penggunaan informasi dalam meningkatkan kinerja SIM”.*³⁵

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala SubBagian Pusat Kajian Amerika dan Eropa (AMEROP) sebagai berikut:

*”Semua kegiatan yang dilakukan oleh BPPK akan berhubungan dengan stakeholders/pemangku kepentingan lain. Penerapan SIM melalui teknologi informasi memiliki kemampuan menghubungkan berbagai pihak sedemikian hingga mereka tetap dapat berhubungan walaupun secara fisik terpisah dalam jarak yang jauh. Dengan terbentuknya hubungan ini, kegiatan kolaborasi, partisipasi, koordinasi, bahkan pemberdayaan dan desentralisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Melalui teknologi informasi dan komunikasi sinergi antar masing-masing pihak yang terhubung akan terbentuk yang saling menguntungkan bagi semuanya. Sehingga tidak lagi ditemui lagi terjadinya duplication of work atau pengulangan kajian yang sama dan banyak proses dapat di eliminasi dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk membentuk hubungan langsung semacam ini”.*³⁶

³⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional (OI) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

³⁶ Wawancara dengan Kepala Bagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

Dari kedua pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan data yang terintegrasi memberikan keuntungan dalam meningkatkan kelancaran komunikasi arus informasi manajerial disemua pengguna. Tanpa adanya integrasi biaya pemrosesan akan semakin meningkat dan meningkatkan kesalahan dalam penyampaian informasi antar pengguna, yang akhirnya akan menyebabkan kelambatan komunikasi antar unit. Penerapan SIM melalui teknologi informasi memiliki kemampuan menghubungkan berbagai pihak sedemikian hingga mereka tetap dapat berhubungan walaupun secara fisik terpisah dalam jarak yang jauh. Dengan terbentuknya hubungan ini, kegiatan kolaborasi, partisipasi, koordinasi, bahkan pemberdayaan dan desentralisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Integrasi data dalam penerapan SIM merupakan bagian dalam penyatuan subsistem-subsistem pada satu sistem yang melingkupinya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan untuk saling membagi informasi kepada setiap unit yang lain, sehingga pembangunan organisasi melalui sharing knowledge dapat diwujudkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Wahyu sebagai berikut:

*“Manfaat yang dapat diberikan dalam proses pentintegrasian data adalah menyangkut standar keamanan sistem dan informasi dalam mendukung kegiatan BPPK. Faktor-faktor yang mendorong dalam penggunaan data yang terintegrasi dalam unit BPPK, yaitu: adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan untuk saling membagi informasi kepada setiap unit yang lain, adanya keinginan untuk mengurangi penggunaan data unik, yang hanya digunakan pada unit tertentu, tersedianya anggaran untuk melakukan desain dan implementasi dalam pengembangan SIM”.*³⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pengintegrasian data didasari oleh adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan untuk saling membagi informasi kepada setiap unit yang lain. Sehingga dimungkinkan untuk

³⁷ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

mengurangi informasi unik yang hanya berlaku bagi satu unit saja. Hal ini juga mengacu pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk ke depan BPPK akan membangun sistem jaringan komputer yang terhubung dalam jaringan seluruh Deplu, dimana nantinya informasi akan terintegrasi dalam satu sumber. Begitu banyak manfaat yang bisa dirasakan dari integrasi data ini, belum bisa dirasakan pada direktorat BPPK. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

“Kegiatan di BPPK belum terlihat adanya integrasi data dalam satu sistem. Bagian-bagian subsistem-subsistem yang ada masih mengurus bidang kerjanya masing-masing, yang belum terhubung dalam satu integrasi data manajemen sistem database. Jadi kalo dilihat penerapan SIM yang ada dikita saat ini masih konvensional setengah komputerisasi. Kedepan kita akan melakukan komputerisasi dengan sistem jaringan intranet yang terhubung dalam jaringan seluruh Deplu, dimana sumber informasi nantinya akan terintegrasi dalam satu sumber. Kondisi sekarang unit di BPPK masih bersifat spesifik dimana pegawai hanya berfokus pada tugas dan fungsinya masing-masing”.³⁸

Bila dilihat pada kenyataan di atas memang untuk membuat suatu sistem data terintegrasi memerlukan biaya yang besar baik dalam hal desain dan perangkat kerasnya serta dalam hal implementasinya. Kenyataan dilapangan masing-masing bagian atau unit di direktorat BPPK mempunyai sistem informasi sendiri dan belum terhubung dengan sistem jaringan yang *on-line*, sehingga tiap-tiap bagian atau unit jika memerlukan informasi yang dibutuhkan dari unit lain adalah dengan membuat *hardcopy*. Hal ini tentunya mengurangi kecepatan serta juga menyebabkan tumpang tindih antara tiap-tiap bagian atau unit tersebut. Dalam jangka panjang penggunaan data yang terintegrasi akan lebih memudahkan pengembangan dari SIM yang ada. Dengan adanya struktur data yang telah dibakukan ke seluruh pengguna suatu data dapat meningkatkan produktivitas suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan akan informasi yang tepat, cepat dan akurat, dengan cara menyediakan sistem-sistem aplikasi berbasis teknologi yang dapat melakukan pengolahan secara otomatis pada tingkatan transaksional,

³⁸ *Ibid.*

operasional, dan manajerial termasuk pengambilan keputusan. Mengenai hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP), menyatakan bahwa :

*”Pengelolaan dan pengolahan data pada deplu masih bersifat parsial, dimana masing-masing unit memiliki data unik sesuai dengan kebutuhan unit tersebut. Begitupun data yang ada di unit BPPK yang terbatas dari BPPK saja. Hal ini kemudian berdampak pada kurang bisanya mengakomodir kepentingan unit yang lain. Seringkali bagi unit kita mendapat kesulitan dalam mendapatkan data yang komprehensif sehingga menyebabkan kelambatan dalam menganalisis terhadap suatu kajian yang kita lakukan. Misalkan kita berbicara tentang bidang militer sampai sejauh mana perkembangannya. Dalam melakukan kajian ini tentunya kita memerlukan sejumlah data yang idealnya terintegrasi dengan unit dan instansi terkait. Integrasi dalam arti memberi kemudahan dalam hal akses pencarian data. Jadi tidak perlu lagi melakukan teknis secara manual mencari data berkas yang berisi folder-folder fisik mengenai data yang kita butuhkan”.*³⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sekretariat BPPK, yang menyatakan bahwa :

”Sebagai unit yang melakukan kajian dalam merespon permasalahan global, BPPK tidak dapat hanya mengandalkan data yang ada pada BPPK saja, namun juga melingkupi dari unit atau instansi terkait. Misalnya kajian terhadap isu tentang penyanderaan kapal oleh perompak yang terjadi di Somalia. Dalam hal ini BPPK akan melihatnya dari sudut pandang hukum internasional dan cara-cara diplomasi. Untuk itu perlu adanya informasi mengenai data siapa yang melakukan pembajakan tersebut, kenapa mereka melakukan hal tersebut, adakah akses untuk melakukan diplomasi dengan mereka. Idealnya dalam hal ini adanya integrasi data dengan insatasi terkait seperti dephan, BIN, kepolisian, dan

³⁹ Wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

lain-lain dalam perolehan data. Sehingga akan nantinya akan sangat memudahkan kita dalam menganalisa permasalahan tersebut”.⁴⁰

Berdasarkan pada kedua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan data yang terintegrasi dalam sistem *database* yang terpusat mutlak diperlukan bagi BPPK dalam melakukan kajian terhadap suatu masalah guna mendapatkan data yang lebih lengkap sehingga akan meningkatkan kualitas bila dilihat dari kecepatan dan ketepatan waktu serta ditunjang oleh data yang lengkap, dimana hasil kajian tersebut akan direkomendasikan kepada menlu dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil. Penerapan SIM secara komputerisasi melalui teknologi memiliki kemampuan menakjubkan dalam mengorganisir data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar secara cepat dan aman. Data yang telah diorganisir ini dapat diakses juga secara cepat dan aman. Data yang dikumpulkan dapat disebarkan kepada semua yang membutuhkan dengan menyediakan kemampuan akses yang cepat dan aman ke pusat-pusat data, informasi, dan pengetahuan yang telah tersedia sebagai hasil dari pengorganisasian data, informasi dan pengetahuan yang telah dilakukan dengan bantuan teknologi. Pada awalnya setiap unit atau bagian direktorat BPPK memiliki sumber informasi sendiri-sendiri untuk kepentingannya, sehingga masing-masing pengguna (*user*) memiliki sistem informasi perangkat keras, perangkat lunak, dan data sendiri-sendiri. Hal ini merujuk pada pernyataan sebelumnya oleh disampaikan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

“.....begini ya mas, di BPPK kita mempunyai tiga unit khusus kajian untuk tiga kawasan, yakni kajian untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kajian untuk kawasan Amerika dan Eropa, dan Kajian untuk kawasan pada Organisasi Internasional, serta satu unit yang mengurus kesekretariatan. Jadi kalo dilihat dari susunan struktur ini jelas akan terlihat bahwa masing-masing unit memiliki jenis informasi yang berbeda disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi unit Aspasaf sendiri jenis informasi yang dikelola adalah informasi seputar permasalahan isu-

⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Sekretariat BPPK Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

isu aktual yang terjadi pada kawasan Aspasaf yang memiliki peran strategis bagi kepentingan bangsa Indonesia, misalnya dalam hal ini mengenai isu perbatasan dengan negara lain yang rawan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melihat ini kami nantinya melakukan rekomendasi perumusan kebijakan berupa policy review dan policy development dengan melakukan kajian terhadap isu terkait melalui pengelolaan dan pengolahan informasi melalui peerapan SIM yang efektif.”⁴¹

Berdasarkan pada pernyataan di atas peneliti melihat bahwa masing-masing unit di BPPK memiliki jenis informasi yang berbeda disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Hal ini berarti bahwa setiap pengguna (*user*) mempunyai kebutuhan data khusus dan unik untuk kepentingan bagiannya, yang mungkin tidak diperlukan oleh bagian lain. Selain itu dapat diketahui juga bahwa keberadaan informasi masih bersifat spesifik bagi masing-masing unit. Walaupun sudah diterapkan sistem *database* terhadap pengelolaan dan pengolahan informasi, namun sangat disayangkan belum terhubung satu unit dengan yang lain. Sehingga sangat menyulitkan dalam hal koordinasi pada masing-masing unit. Hal ini menyebabkan sering terjadinya duplikasi atau data tidak dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya. Padahal hakekat Sistem informasi manajemen yang digunakan memungkinkan setiap personal di dalam organisasi mengetahui apa yang dilaksanakan oleh rekan-rekannya dalam unit yang sama dan memungkinkan pula personal dalam unit mengetahui apa yang dikerjakan oleh rekan-rekannya pada unit-unit lain di dalam organisasi. Dengan demikian seluruh kegiatan personal terarah pada suatu tujuan bersama.

Menganggapi hal ini bahwa kesadaran menyatukan informasi dalam sistem *database* merupakan suatu keharusan khususnya bagi BBPK agar semua informasi itu ada di dalam satu *server* yang bisa di akses kepada seluruh pegawai BPPK. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional sebagai berikut:

⁴¹ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

*“Kita mau informasi itu tidak hanya berada di komputer masing-masing, kita mau semua informasi itu ada di dalam satu server yang bisa di akses kepada seluruh pegawai BPPK dengan tingkatan administrasi yang berbeda-beda. Misalnya eselon I dan II dapat mengakses informasi secara keseluruhan, tetapi untuk eselon III dan IV hanya beberapa informasi yang bisa di akses. Semua bisa melakukan edit, dimana ada administratornya yang mengurus hal tersebut”.*⁴²

Berdasarkan pernyataan di atas menurut peneliti dengan adanya penyimpanan data (*storage of information*) dalam satu wadah yang didukung oleh kemampuan penyimpanan dalam jumlah yang besar, akan memberikan keuntungan dalam hal pembakuan struktur data ke seluruh pengguna (*user*) hingga akan tercipta suatu kesatuan konsep, dalam artian bahwa data yang dipakai mengandung arti yang sama. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat bahwa direktorat BPPK dalam menyusun SIM masih bersifat sebagian-sebagian, tidak secara keseluruhan dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan alasan ingin menghemat biaya dalam pembangunan infrastruktur perangkat keras (*hardware*) dan penggunaan perangkat lunak (*software*) karena mahalnya biaya penyediaan infrastruktur dan biaya pemeliharaan serta penggunaan program aplikasi. Hal tersebut sebenarnya akan merugikan BPPK itu sendiri karena biasanya masing-masing bagian mempunyai sistem sendiri yang tidak dikaitkan satu sama lainnya, sehingga bisa menimbulkan *duplication of work*. Akibatnya terjadi pemborosan waktu, uang dan sumber daya lainnya yang berpengaruh pada kualitas hasil kajian yang akurat dan cepat sebagai rekomendasi dalam penyusunan kebijakan luar negeri.

Dengan melihat pemaparan di atas dapat disimpulkan pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM pada hakikatnya ditujukan dalam rangka penintegrasian guna menyatupadukan semua unsur dan bagian yang berkaitan atau dapat juga dikatakan sebagai merangkai pandangan-pandangan yang lengkap mengenai subsistem yang berkaitan. Berdasar hal ini hubungan antara SIM dan

⁴² Wawancara dengan Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional (OI) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

integrasi data sangat erat dalam membangun menghubungkan berbagai pihak sedemikian hingga mereka tetap dapat berhubungan walaupun secara fisik terpisah dalam jarak yang jauh. Dengan terbentuknya hubungan ini, kegiatan kolaborasi, partisipasi, koordinasi, bahkan pemberdayaan dan desentralisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini dipengaruhi oleh adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan untuk saling membagi informasi kepada setiap unit yang lain, sehingga pembangunan organisasi melalui *sharing knowledge* dapat diwujudkan. Merujuk pada penjelasan di atas penerapan SIM yang dilakukan direktorat BPPK berdasar analisis integrasi data melalui *information central database* belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan penggunaan data yang telah dibakukan dalam suatu kesatuan konsep pada direktorat BPPK dalam menyusun SIM masih bersifat sebagian-sebagian, tidak secara keseluruhan dalam satu sistem yang terintegrasi. Sehingga belum terwujudnya hubungan secara langsung dengan *stakeholders* lainnya dalam kegiatan kolaborasi, partisipasi, koordinasi, bahkan pemberdayaan dan desentralisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang menyebabkan sulitnya koordinasi pada masing-masing unit.

1.1.7 Common Data Flows

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh BPPK baik dalam kaitannya dengan internal organisasi maupun pihak eksternal sebagian besar adalah pekerjaan repetitif yang sudah baku. Fungsi pengelolaan data dalam operasi SIM merupakan komponen yang sangat penting, bahkan sangat menentukan bagi terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan bagi suatu organisasi. Hal ini karena fungsi pengelolaan data sebagai tahap kegiatan yang paling dominan untuk menghasilkan berbagai kebutuhan informasi yang relevan dan memiliki nilai guna, yakni sebagai dasar dalam mendukung peningkatan kualitas pengambilan keputusan maupun langkah atau tindakan yang perlu dilakukan. Efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK ditandai dengan pola aliran informasi secara otomatisasi melalui perangkat komputer. Dengan penerapan SIM dalam pengelolaan dan pengolahan informasi melalui komputerisasi memungkinkan untuk mempercepat pelaksanaan transaksi kegiatan.

Dengan demikian permasalahan akan cepat dideteksi, diidentifikasi, dan diselesaikan. Pada akhirnya efisiensi dan produktivitas di segala sektor akan meningkat. Produktivitas bangsa adalah salah satu unsur yang sangat berperan dalam penentuan daya saing bangsa.

Pentingnya fungsi pengelolaan data dalam mewujudkan operasi SIM yang efektif adalah informasi yang *up to date* yang siap setiap saat dipergunakan dalam rangka mendukung pengambilan berbagai keputusan dan serangkaian tindakan, baik tindakan yang bersifat rutin yang telah dijadwalkan secara periodik maupun pengambilan keputusan atau tindakan yang bersifat mendadak secara insidental sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jenis informasi yang dikelola dan diolah oleh direktorat BPPK. Mengenai jenis informasi yang dikelola dan diolah oleh direktorat BPPK setidaknya ada dua sumber informasi yang dipergunakan BPPK sebagai input bagi BPPK dalam melakukan kajian penelitian, yakni: sumber informasi internal organisasi dan sumber informasi eksternal organisasi. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

“Jenis informasi yang dikelola dan diolah oleh BPPK terdiri dari, sumber informasi dari internal organisasi dan sumber informasi dari eksternal organisasi. Sumber informasi internal organisasi berasal dari Deplu dan perwakilan Deplu di luar. informasi yang berasal dari deplu ber sumber dari rapat pimpinan yang diturunkan kepada unit-unit dibawahnya. Rapat pimpinan tersebut berisi tentang skala prioritas mengenai arah dan tujuan dari kebijakan. Selain itu sumber informasi internal organisasi berasal dari perwakilan Deplu di luar bersumber dari surat kawat biasa dan surat kawat rahasia melalui kedubes yang tersebar di berbagai negara. Mekanisme pelaporan dari kedubes RI dilakukan setiap minggu yang mencermati perkembangan ekopolsosbud dari negara yang bersangkutan. Sedangkan sumber informasi eksternal organisasi bersumber dari masukan-masukan institusi/instansi yang terkait dengan isu-isu kita,

*misalnya kasus mengenai global warming maka akan terkait dengan departemen lingkungan hidup”.*⁴³

Hal Senada juga disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP), sebagai berikut :

*”Jenis informasi yang dibutuhkan oleh pejabat eselon 1 dan 2 adalah jenis informasi yang benar-benar up to date dan cepat. Up to date dalam arti data yang kita butuhkan tersedia secara lengkap dalam memenuhi kebutuhan informasi terhadap suatu kajian dan cepat yang berarti perolehan informasi tidak terlalu baku dan birokrasi, yakni akses terhadap informasi mudah tidak perlu berjenjang. Karena selama ini pola aliran yang ada masih berjenjang, sehingga dapat menghambat untuk mendapatkan data yang cepat”.*⁴⁴

Berdasarkan pada pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pola aliran informasi melalui SIM belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM belum sepenuhnya dilakukan secara komputerisasi yang masih bersifat semi konvensional sehingga masih dirasakan mengikuti jenjang birokrasi. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya kelambatan dalam perolehan data sehingga mengurangi kualitas hasil kajian yang dilakukan bila dilihat dari segi waktu. Dalam kaitannya dengan jenis informasi ini, sumber informasi dari eksternal organisasi dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan hambatan organisasi, sedangkan sumber informasi dari internal organisasi dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan tingkat manajerial, keputusan yang diambil manajer bawahan (*lower management*) sebagian besar adalah keputusan yang dapat diprogramkan, yakni keputusan yang hanya terbatas pada masalah-masalah rutin. Sedangkan keputusan yang diambil oleh manajer menengah (*middle management*) sebagian besar dan keputusan yang diambil oleh manajemen puncak

⁴³ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

(*top management*) adalah keputusan yang tidak dapat diprogram karena tidak ada strukturnya, baru, berpengaruh besar sehingga sulit untuk dikendalikan atau kompleks. Hal ini terkait dengan pola aliran informasi yang sudah berjalan di BPPK, baik secara internal organisasi maupun eksternal antar organisasi seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional sebagai berikut:

“pola aliran informasi pada unit kita mengkolaborasikan antara mekanisme top down dan mekanisme bottom up. aliran informasi dari atas kebawah terkait dengan kebijakan yang dibuat pada level top management yang mempengaruhi keseluruhan unit BPPK. Inisiatif keputusan berasal dari pimpinan yang kemudian diteruskan pada seluruh unit-unit di BPPK. Sedangkan aliran informasi dari bawah ke atas terkait dengan rekomendasi kebijakan dari hasil kajian yang telah kita lakukan dalam memberikan masukan pada proses pembuatan kebijakan. Inisiatif keputusan berasal dari unit-unit dibawahnya yang kemudian diteruskan keatas sebagai rekomendasi pembuatan kebijakan”.⁴⁵

Pola aliran informasi pada direktorat BPPK dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pemrosesan informasi dilakukan secara manual dan pemrosesan informasi dilakukan dengan sistem komputer. Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa penerapan SIM yang ada di BPPK, saat ini masih bersifat konvensional setengah komputerisasi. Artinya bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan secara otomatisasi melalui perangkat komputer. Hal ini membuktikan bahwa peranan pengelolaan dan pengolahan informasi di BPPK secara manual belum bisa ditinggalkan begitu saja, yakni menyangkut pembukuan atas pencatatan manual informasi yang masuk. Mengenai hal ini pada direktorat BPPK pencatatan secara manual dilakukan terhadap surat kawat yang masuk yang kemudian diklasifikasikan berdasar pada unit-unit terkait. Sedangkan untuk informasi yang terkandung dalam surat tersebut sudah

⁴⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Pusat Kajian Pada Organisasi Internasional (OI) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

dimasukan dalam *database* untuk keperluan kajian yang dilakukan. Menyinggung permasalahan ini Kepala Sekretariat BPPK menyatakan bahwa :

”Kalau kita melihat BPPK sebagai suatu organisasi yang utuh, idealnya informasi yang dihasilkan oleh unit lain bisa jadi menjadi bahan masukan bagi unit lain. Misalnya dalam hal masalah kepegawaian pada unit kita, sistem database yang kita lakukan masih berupa berkas fisik yang kita susun dalam satu lemari mengenai data seluruh pegawai pada direktorat BPPK. Masalah yang timbul kemudian adalah pemanfaatan ruang yang yang banyak memakan tempat. Bisa dibayangkan coba perubahan data kepegawaian yang sifatnya dinamis tentunya akan selalu berubah yang berdampak pada semakin besarnya tempat yang harus disediakan”.⁴⁶

Kurang baiknya tingkat efektivitas fungsi pengelolaan data dalam penerapan SIM pada direktorat BPPK, merupakan kendala yang sering mengakibatkan terjadinya kelambatan, ketidakakuratan, ketidaktepatan informasi yang dihasilkan, sehingga proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang memuaskan karena belum sepenuhnya didukung oleh informasi yang *up to date*. Dari pengamatan yang dilakukan, lebih lanjut mengenai kurang baiknya fungsi pengelolaan data dalam penerapan SIM pada direktorat BPPK erat kaitannya dengan belum optimalnya tingkat kemampuan perangkat lunak (*software*) pada sistem komputer yang digunakan. Keadaan tersebut menyebabkan sistem pengoperasian atau sistem manajemen data, aplikasi perangkat model analisis, serta aplikasi berbagai program yang dirancang khusus dalam perumusan pembuatan keputusan belum berfungsinya secara optimal. Dengan memperhatikan kenyataan di atas maka dalam rangka mewujudkan SIM yang efektif guna mendukung peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan, direktorat BPPK Departemen Luar Negeri dihadapkan pada tantangan yang senantiasa meningkatkan kemampuan atau kualitas penggunaan komputer dengan *tools* pendukungnya. Di samping yang tidak kalah penting adalah peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia terutama dalam

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Sekretariat BPPK, pada Tanggal 23 Desember 2008, diizinkan untuk dikutip.

pengoperasian sistem komputer, sehingga berbagai tahap dalam kinerja fungsi pengelolaan data dapat benar-benar menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Sesuai dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fungsi pengelolaan data merupakan salah satu unsur penting untuk dapat mewujudkan suatu sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan SIM yang dilakukan pada direktorat BPPK berkaitan dengan analisis standar arus data mengenai pengolahan data dinilai masih belum efektif. Hal ini dikarenakan bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan secara otomatisasi melalui perangkat komputer. Sehingga sering mengakibatkan terjadinya kelambatan, ketidakakuratan, ketidaktepatan informasi yang dihasilkan, sehingga proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang memuaskan karena belum sepenuhnya didukung oleh informasi yang *up to date*.

4.2 Kendala Dalam Penerapan SIM Pada Direktorat BPPK

Keberhasilan suatu sistem informasi tergantung dari kemampuan memadukan antara kendala yang ada dengan tujuan sistem tersebut. Penerapan dan pengembangan SIM yang dilakukan bukan berarti tanpa adanya masalah yang melingkupinya. Bila dilihat dari organisasi pemerintahan permasalahan yang biasa terjadi ialah dalam hal *good will* dan masalah anggaran. Sering kali ditemui organisasi pemerintahan merasa nyaman dengan kondisi atau keadaan yang sekarang, sehingga menjadi resisten terhadap pembaharuan yang mempengaruhi suatu organisasi. Hal ini dikarenakan seringkali pembaharuan yang dilakukan akan mengganggu peran atau fungsi suatu unit karena sudah terbiasa dengan tatacara kerja rutin. Untuk itu dalam mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan yang dinamis, suatu organisasi dituntut untuk lebih responsif dan peka terhadap kondisi tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa sebagai berikut:

”Penerapan dan pengembangan SIM di direktorat BPPK kerap kali meniadakan perubahan di perlbagai unit kita, misalnya bagian unit

*kesekretariatan sub pencatatan manual surat kawat akan dilebur dengan bagain umum agar SIM dapa digunakan secara lebih efisien. Perubahan semacam ini tentunya akan mendapat tentangan oleh anggota bagian tersebut, karena mereka enggan mengubah tatacara kerja rutin yang biasa mereka lakukan. Untuk itu justru perubahan yang sering kali dilakukan pada unit kita mendapat kendala dari internal organisasi sendiri”.*⁴⁷

Berdasarkan pada pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh suatu organisasi sering kali berasal dari internal organisasi yang menolak adanya perubahan dalam organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu organisasi harus ditunjang dengan komitmen yang kuat dalam kerangka perbaikan atas sistem yang ada. Kebutuhan informasi yang cepat, tepat, dan terpadu semakin memegang peranan penting sebagai pendukung serangkaian kegiatan dalam rangka mengoptimalkan proses perumusan kebijakan. Kemampuan untuk membuat perkiraan keadaan dalam perumusan suatu kebijakan, secara sistem haruslah didukung dengan adanya informasi yang terdapat dalam organisasi sudah terorganisir dengan baik. Informasi yang terorganisir dengan baik akan membantu suatu organisasi mengantisipasi lingkungannya yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Hal ini dikarenakan informasi yang cepat dan akurat menjadi tolak ukur bagi BPPK dalam melakukan tugas dan fungsinya terhadap suatu kajian yang berkualitas yang mampu memberikan laporan yang lebih akurat dan cepat. Tujuan dari penerapan SIM dalam suatu organisasi adalah membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan akurat guna meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam pengembangan organisasi yang responsif terhadap lingkungannya, pemimpin mempunyai peran yang strategis dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Hal bisa dilihat dari penjabaran visi dan misi suatu organisasi yang merupakan buah atas pemikiran dari pemimpin. Pemimpin mempunyai andil besar

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Amerika dan Eropa (AMEROP) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

dalam mempengaruhi organisasi secara keseluruhan melalui kebijakan atau keputusan yang di ambil. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan dan pengembangan SIM yang dilakukan pada direktorat BPPK harus didukung dengan adanya *good will* dari level pimpinan yang akan menentukan arah dan tujuan dari penerapan SIM tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

*”Kendala yang biasa ditemui pada organisasi pemerintahan adalah mengenai good will dan anggaran. Good will pimpinan akan menentukan arah dan tujuan dari penerapan SIM, selain juga sebagai pemberi persetujuan terhadap penerapan dan pengembangan SIM di BPPK. Seringkali ditemui kendala dalam hal sinkronisasi atas good will yang lebih besar di atas unit BPPK, misalnya Sekjen. Good will dari BPPK akan ditampung di Sekjen dalam bentuk anggaran. Dimana bila disertai dengan adanya good will dari pimpinan BPPK maka selanjutnya akan dimasukkan dalam rencana anggaran kalau pimpinan yang lebih tinggi juga memiliki good will yang sama maka akan terwujudlah penerapan dan pengembangan SIM pada satu organisasi, sebaliknya bila pimpinan yang lebih tinggi tidak memiliki good will yang sama maka penerapan dan pengembangan SIM belum layak atau tidak dapat dimasukkan dalam rencana anggaran. Bila dalam organisasi sudah terjadi kesepakatan mengenai good will ini maka sampai Departemen Keuangan akan memberikan budget berdasar rencana anggaran yang diajukan”.*⁴⁸

Berdasarkan pernyataan di atas menurut peneliti kendala dalam hal *good will* ini mempengaruhi rencana anggaran yang akan diberikan. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa membuat suatu sistem pengelolaan dan pengolahan informasi yang terpadu dalam integrasi sistem *database* memerlukan biaya yang besar baik dalam hal desain dan perangkat kerasnya serta dalam hal implementasinya. Melalui *good will* dari level pimpinan akan sangat mempengaruhi perolehan anggaran dalam penyediaan infrastruktur berupa penyediaan jaringan dan perangkat keras lainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut:

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala SubBagian Pusat Kajian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 21 November 2008, diizinkan untuk dikutip.

*”kalau sudah mendapat restu dari pimpinan maka urusan birokrasi kebawahnya mengenai usulan anggaran akan mudah. Bila ada good will dari top manajemen maka usulan dari pimpinan dari kepala badan terhadap penerapan SIM pada unit kita terhadap pengelolaan dan pengolahan informasi, akan mendapat lampu hijau dari pimpinan dalam persetujuan post anggaran”.*⁴⁹

Kendala lain dalam penerapan SIM di direktorat BPPK ialah mengenai budget anggaran, dimana hal ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan budget anggaran pemerintah dalam APBN. Hal ini berdampak pada semakin ketatnya pengisian anggaran terhadap usulan dalam melakukan inovasi baru. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Wahyu sebagai berikut:

*”kalau kita melihat rencana anggaran dalam organisasi pemerintahan, maka akan terkait dengan RKKL yang berisikan rencana anggaran selama setahun bagi setiap departemen. Persetujuan anggaran ini melalui departemen keuangan yang dalam hal ini sebagai regulator terhadap pengaturan uang negara. Untuk itu setiap kita memberikan usulan inovasi baru, sering kali mendapat hambatan dalam hal pengajuan anggaran baru, begitu pula dengan penerapan SIM yang ada di BPPK. Sehingga seperti yang mas lihat, penerapan SIM yang ada masih belum maksimal dalam upaya mendukung kegiatan BPPK”.*⁵⁰

Peneliti melihat bahwa kendala dalam efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK ialah belum terintegrasinya sistem *database* yang terhubung *online* melalui jaringan intranet yang menghubungkan masing-masing *workstation/PC* pada setiap unit di direktorat BPPK. Hal ini berarti bahwa penerapan SIM yang dilakukan masih bersifat sebagian-sebagian, tidak secara keseluruhan dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini terkait dengan mahalnya biaya penyediaan infrastruktur dan biaya pemeliharaan serta penggunaan program aplikasi. Akibatnya kendala yang ditemui menjadikan terjadinya pemborosan waktu, uang dan sumber daya lainnya yang berpengaruh pada kualitas hasil kajian yang akurat dan cepat sebagai

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

rekomendasi dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Di samping itu peneliti melihat bahwa penerapan SIM di BPPK sebagai subsistem dari SIM Departemen Luar Negeri secara keseluruhan masih terpisah belum menjadi satu sistem kesatuan yang besar. Dimana masing-masing bagian atau unit di Departemen Luar Negeri mempunyai sistem informasi sendiri dan belum terhubung dengan sistem jaringan yang *on-line*, sehingga tiap-tiap bagian atau unit jika memerlukan informasi yang dibutuhkan dari unit lain adalah dengan membuat *hardcopy*. Sehingga tentunya menjadi kendala dalam mengurangi kecepatan serta juga ketidakakuratan, ketidaktepatan informasi yang dihasilkan, sehingga proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang memuaskan karena belum sepenuhnya didukung oleh informasi yang *up to date*. Hal ini dikarenakan dua permasalahan utama yang menjadi kendala atas penerapan SIM pada direktorat BPPK yakni mengenai adanya *good will* dari level pimpinan mengenai urgensi penerapan SIM bagi BPPK dan budget anggaran pemerintah yang terbatas dalam mencukupi kebutuhan setiap departemen pemerintah. Menurut peneliti dalam hal ini perlu adanya penyimpanan data (*storage of information*) dalam satu wadah yang didukung oleh kemampuan penyimpanan dalam jumlah yang besar, akan memberikan keuntungan dalam hal pembakuan struktur data ke seluruh pengguna (*user*) hingga akan tercipta suatu kesatuan konsep, dalam artian bahwa data yang dipakai mengandung arti yang sama. Sehingga Sistem informasi manajemen yang digunakan memungkinkan setiap personal di dalam organisasi mengetahui apa yang dilaksanakan oleh rekan-rekannya dalam unit yang sama dan memungkinkan pula personal dalam unit mengetahui apa yang dikerjakan oleh rekan-rekannya pada unit-unit lain di dalam organisasi. Dengan demikian seluruh kegiatan personal terarah pada suatu tujuan bersama.

Dengan melihat kenyataan di atas bahwa kendala yang dihadapi BPPK akan menjadi penghambat penerapan efektivitas SIM dalam pengelolaan dan pengolahan informasi. Hal ini dikarenakan bahwa investasi yang besar dalam penerapan dan pengembangan SIM pada direktorat BPPK akan dibayar dengan hasil yang berkualitas terhadap tugas penelitian dan pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh BPPK. Sehingga output yang dihasilkan berupa *policy planning* dan

policy review dapat memberikan hasil yang maksimal yang akan direkomendasikan kepada Menteri Luar Negeri

